

**KERJASAMA INDONESIA DAN FILIPINA DALAM MENGHADAPI KASUS
PEMBAJAKAN KAPAL DI WILAYAH PERBATASAN PADA TAHUN 2016-2018**

SKRIPSI



PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**KERJASAMA INDONESIA DAN FILIPINA DALAM MENGHADAPI KASUS
PEMBAJAKAN KAPAL DI WILAYAH PERBATASAN PADA TAHUN 2016-2018**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



VALERY FATHUR RABBANI

15323097

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**KERJASAMA INDONESIA DAN FILIPINA DALAM MENGHADAPI KASUS
PEMBAJAKAN KAPAL DI WILAYAH PERBATASAN PADA TAHUN 2016-2018**

Dipertahankan di depan Dosen Penguji Skripsi Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S-I Hubungan Internasional
Pada Tanggal

1, 9 NOV 2019

Oleh

VALERY FATHUR RABBANI
15323097

Mengesahkan,

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A

Tanda Tangan

Dewan Penguji

1. Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A

2. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A

3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Valery Fathur Rabbani

No Mahasiswa : 15323097

Program Studi : Hubungan Internasional

1. Judul Skripsi : Kerjasama Indonesia Dan Filipina Dalam Menghadapi Kasus Pembajakan Kapal di Wilayah Perbatasan Pada Tahun 2016-2018.

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang diterapkan Universitas Islam Indonesia.

Yang Menyatakan,



Valery Fathur Rabbani

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala kesempatan, kesehatan, serta rezeki untuk melanjutkan S1 ini hingga akhir. Shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada nabi Muhammad SAW. Karya sederhana ini

kupersembahkan untuk :

Papa dan Mama

Papa dan mamaku tersayang terimakasih atas limpahan kasih sayang dan semua yang diberikan kepada Fathur selama ini hingga bisa sampai sekarang. Papa dan Mama terimakasih atas limpahan doa, nasehat, dukungan, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga serta selalu memberikan fasilitas terbaik selama ini. Semoga dengan selesainya studi S1 ini bisa membuat Papa dan Mama bahagia dan bangga dengan perjuangan Fathur yang merantau dalam menuntut ilmu.

Kakek dan Nenek

Untuk Kakek dan Nenek, terimakasih sudah memberikan support dan semangat untuk Fathur dalam menuntut ilmu di Jogja. Terimakasih kalian sudah selalu menjadi keluarga yang selalu memberikan dukungan untukku.

Semoga aku bisa selalu membahagiakan kalian.

Semua Keluarga Besar

Terima kasih atas doa, nasehat, dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama ini.

HALAMAN MOTTO

“Kesuksesan ”

“Kesuksesan dalam kehidupan ini ada 3 jenisnya. Pertama, sukses untuk dunia namun tidak memikirkan akhirat. Kedua, sibuk mengejar akhirat namun melupakan kehidupan duniawi. Ketiga, sukses di dunia yang segala kesuksesan tersebut ditujukan untuk keselamatan akhirat”

“I'd never stop when I fail. I do when I succeed”

لَا يَجِدُ مَا كَفَّرَ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur tak terhingga kepada Allah *Subhanallahu wa ta'alla* yang Maha Agung dan Maha Pengasih atas nikmat dan rahmat-Nya, serta segala kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, mama dan papa yang tiada hentinya memberikan doa, cinta, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tak terhingga selama ini hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Kakek dan Nenek yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa selama peneliti mengerjakan skripsi.
3. Bapak Irawan Jati, S.IP.,M.Hum.,M.S.S selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, serta sebagai dosen pembimbing awal skripsi.
4. Bapak Irawan Jati, S.IP.,M.Hum.,M.S.S. dan Bung Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan

nasehat maupun masukan yang membangun serta memotifasi kepada penulis selama ini dan juga selalu memberikan waktu dalam melakukan bimbingan sehingga dalam proses pengerjaan skripsi dapat menjadi lebih mudah dan terarah. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa, penulis sering

membuat kesalahan. Semoga Pak Jati dan Bung Gera selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT.

5. Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan nasehat bagi segala kebingungan dan keluhan selama menjalankan kuliah. Juga sebagai Dosen Penguji Sidang Skripsi, terimakasih untuk segala saran dan arahnya. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan Ibu dengan kebaikan yang lebih mulia.
6. Seluruh dosen Hubungan Internasional serta dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan sampai saat ini.
7. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti selama menjadi mahasiswa.
8. Mba Mardiatul Khasanah yang telah membantu dalam pengurusan izin dan surat-surat kebutuhan skripsi, serta memberi kemudahan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

9. Terimakasih kepada persepupuan Ka Winda, Dandy, Ka Bella. Terimakasih kepada Cicik Nety, Bude, Pakde yang telah memberikan dukungan moril selama ini.
10. Terimakasih kepada Riztia Nilfarisa yang membantu dalam mengerjakan skripsi sebagai mental support dan juga sebagai teman terbaik. Terimakasih sudah mau menjadi teman yang selalu mensupport dimanapun dan kapanpun. Semoga selalu diberikan kelancaran oleh Allah SWT dalam segala urusannya. Juga tidak lupa terimakasih kepada Aan yang berkontribusi banyak dalam proses pengerjaan skripsi.
11. Terimakasih kepada sahabat Kontrakan Squad: Aan, Ing, Elham, Gilang yang telah menjadi sahabat terbaik yang selalu ada dimanapun dan kapanpun baik suka maupun duka. Semoga kita selalu bersahabat dan bersaudara sampai kita tua, menjadi sahabat dunia akhirat guys.
12. Teman-teman HI angkatan 2015 yang telah berjuang bersama selama 4 tahun ini terutama teman-teman kelas C.

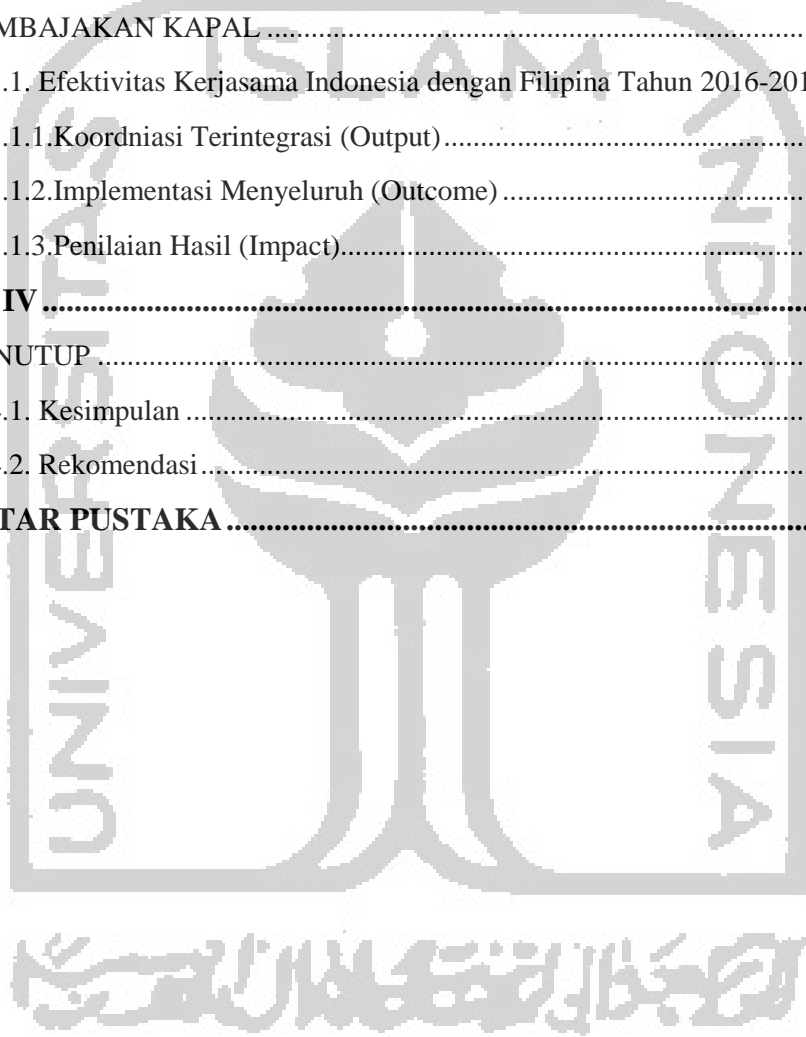
Sekali lagi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berperan baik yang telah disebutkan maupun tidak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menginspirasi pembaca untuk menemukan beberapa penelitian yang baru dan inovatif.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

HALAMAN DAFTAR ISI

KERJASAMA INDONESIA DAN FILIPINA DALAM MENGHADAPI KASUS PEMBAJAKAN KAPAL DI WILAYAH PERBATASAN PADA TAHUN 2016-2018	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	16
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Signifikansi	17
1.5. Cakupan Penelitian	18
1.6. Tinjauan Pustaka.....	18
1.7. Landasan Teori / Konsep	21
1.8. Metodologi Penelitian.....	25
1.8.1 Jenis Penelitian.....	25
1.8.2 Subjek Penelitian.....	25
1.8.3 Alat Pengumpul Data.....	26
1.8.4 Proses Penelitian	27
BAB II	28
KERUMITAN MASALAH DAN KAPASITAS PENYELESAIAN MASALAH	28
2.1. KERUMITAN MASALAH	28
2.1.1 Incongruity.....	28
2.1.2 Asymmetry.....	34

2.1.3 Cumulative Cleavages.....	37
2.2. KAPASITAS PENYELESAIAN MASALAH	38
2.2.1 Institutional Setting	38
2.2.2 Distribution of Power.....	39
2.2.3 Skill and Energy	40
BAB III.....	43
EFEKTIVITAS KERJASAMA INDONESIA DENGAN FILIPINA MENGHADAPI PEMBAJAKAN KAPAL	43
3.1. Efektivitas Kerjasama Indonesia dengan Filipina Tahun 2016-2018	44
3.1.1.Koordinasi Terintegrasi (Output).....	52
3.1.2.Implementasi Menyeluruh (Outcome)	54
3.1.3.Penilaian Hasil (Impact).....	56
BAB IV	60
PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Rekomendasi.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Pembajakan Kapal Di Asia Tahun 2017.....	48
Tabel 3.1 Jumlah Pembajakan Kapal Di Asia Tahun 2018.....	50
Tabel 3.1.3 Jumlah Pembajakan Kapal Tahun 2016-2018 Laut Sulu.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laut Sulu	11
Gambar 3.1 Lokasi Pembajakan di Asia Tenggara tahun 2016.....	46
Gambar 3.1 Lokasi Pembajakan di Asia Tenggara Tahun 2017	48
Gam 3.1 Lokasi Pembajakan di Asia Tenggara 2018.....	49



ABSTRAK

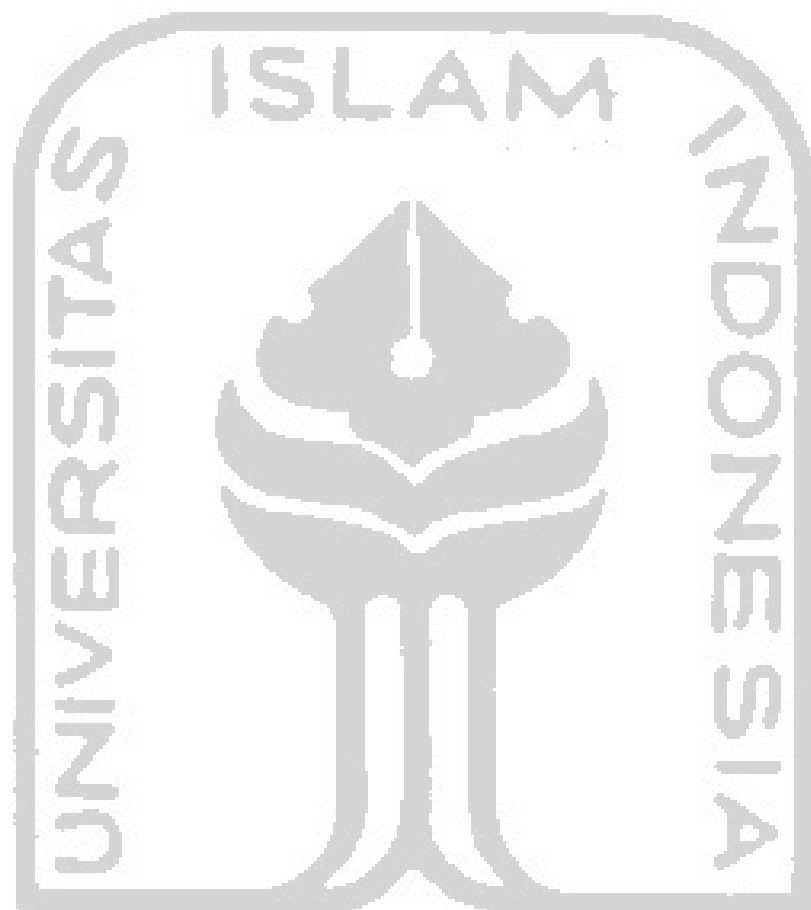
Kerjasama internasional menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh setiap negara untuk menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam suatu kerjasama internasional terdapat berbagai macam kepentingan nasional dari masing-masing negara yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri sendiri. Hal tersebutlah yang melatar belakangi Indonesia dan Filipina melakukan kerjasama keamanan dan pertahanan menghadapi permasalahan pembajakan kapal di wilayah perbatasan kedua negara atau tepatnya di perairan Sulu. Banyaknya laporan terjadinya pembajakan kapal hingga memakan korban mulai tahun 2016, membuat pemerintah kedua negara dengan cepat melakukan kerjasama karena permasalahan ini dinilai sangat mengganggu keamanan serta kedaulatan Indonesia dan Filipina. Sejak itulah kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama terutama di wilayah perbatasan dengan melakukan patroli Bersama hingga latihan militer gabungan. Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Rezim yang dikemukakan oleh Arild Underdal

Kata Kunci: Kerjasama, Keamanan, Indonesia, Filipina, Laut Sulu, Pembajakan Kapal

ABSTRACT

International cooperation is a necessity for every country to ensure the survival of the nation and state. In an international cooperation there are various kinds of national interests of each country that cannot be fulfilled in their own country. This is the background for Indonesia and the Philippines to cooperate in security and defense in dealing with the problem of piracy in the border regions of the two countries or precisely in the waters of Sulu. The number of reports of ship hijacking that took casualties starting in 2016, made the governments of the two countries quickly collaborate because this problem was considered very disturbing the security and sovereignty of Indonesia and the Philippines. Since then the two countries agreed to increase cooperation, especially in border areas by conducting joint patrols to joint military exercises. This study uses the Effectiveness of Regime theory proposed by Arild Underdal

Keywords: Cooperation, Security, Indonesia, Philippines, Sulu Sea, Ship Hijacking



جامعة الإسلام في إندونيسيا

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang wilayahnya didominasi oleh perairan. Salah satu perairan yang paling penting dan rawan adalah perairan Sulu yang menjadi perbatasan antara negara Indonesia dan juga Filipina. Beberapa waktu belakangan, wilayah tersebut telah menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi. Clark Reynolds menyatakan bahwa kondisi keamanan suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari keadaan geografisnya. Ia menyatakan *“Geography is the major determining factor in any nation’s ability to utilize the sea commercially and to defend its political and economic integrity from overseas attack.”* (Reynolds, 1974). Dengan kondisi geografis perairan Sulu yang mencakup perairan Indonesia di sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan sebagian perairan Sabah, maka isu keamanan memiliki implikasi terhadap hubungan internasional, yang mana dalam hal ini Indonesia dan Filipina menjadi negara yang sangat berkepentingan dalam menciptakan stabilitas di kawasan tersebut.

Melihat hal tersebut, kedua negara sudah sepantasnya saling bekerjasama untuk setidaknya dapat mengamankan kepentingan bersama terlebih dahulu, mengingat kawasan perairan Sulu ini merupakan jalur mobilitas perdagangan dan warga kedua negara dalam menciptakan hubungan satu sama lain. Berbagai kerjasama dan kesepakatan dari banyak isu sudah dilakukan oleh negara Indonesia dan Filipina mulai dari isu perekonomian, pertahanan, hingga isu keamanan perbatasan. Namun dari berbagai isu atau permasalahan tersebut, saat ini kedua

negara sepakat untuk mempererat kerjasama pada isu keamanan perbatasan terutama untuk masalah pembajakan kapal. Pembajakan kapal menjadi isu atau permasalahan yang belakangan ini menjadi pembahasan hangat dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina. Salah satu kasus pembajakan kapal yang paling banyak menarik perhatian adalah ketika beberapa waktu yang lalu tepatnya pada bulan Maret 2016 terjadi aksi pembajakan dan penyanderaan terhadap beberapa warga negara Indonesia yang merupakan anak buah kapal Brahma 12 yang berjumlah 10 orang, dan juga anak buah kapal tongkang Anand 12 yang berlayar dari Kalimantan Selatan menuju Filipina yang dilakukan oleh kelompok kejahatan Abu Sayyaf (Tempo, 2016). Kejadian ini tentu menimbulkan reaksi dari kedua negara yang terlibat yakni Indonesia dan juga Filipina yang kemudian berinisiatif untuk meningkatkan kerjasama di sektor keamanan perbatasan demi meminimalisir terjadinya aksi serupa di kemudian hari.

Sebelum isu pembajakan kapal ini ramai diperbincangkan, Indonesia dan juga Filipina sudah melakukan kerjasama *Joint Patroli* dan juga *Joint Border Committee* (JBC) yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka mengimplementasikan perjanjian *1975 Border Patroli Agreement* dan perjanjian kerjasama Lintas Batas (*Border Crossing Agreement*) tahun 1975 berbagai bidang (Direktorat Informasi dan Media & Biro Administrasi Menteri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015). Kerjasama ini dibuat dalam rangka memfasilitasi kegiatan lintas batas secara tradisional yang selama ini telah dilakukan orang-orang di kedua wilayah perbatasan Indonesia dan juga Filipina. Pada tanggal 4 Juli 1956, kedua negara menandatangani *Immigration Agreement between the Republic of Philippines and the Republic of*

Indonesia. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadikan wilayah perbatasan lebih tertib dan aman. Kemudian pada tanggal 14 September 1965 di Manila ditandatangani kesepakatan kerjasama *Joint Directives and Guidelines of the Implementation of the Immigration Agreement on Repatriation and Border Crossing Arrangement Between the Republic of Indonesia and the Republic of Philippines* yang mengatur tentang mobilitas pelintas batas dan nilai barang bawaan serta jenis barang bawaan yang diperbolehkan, yaitu barang-barang untuk kebutuhan hidup dengan nilai di bawah 500 peso per-orang (Raharjo, 2017, hal. 3-4).

Kemudian sampai saat ini, kerjasama tersebut menjadi dasar atau acuan kedua negara dalam menjalankan kerjasama keamanan perbatasan yang mulai terdapat banyak aksi pembajakan hingga penyanderaan kapal dari kedua negara. Oleh karena itu, kemudian kerjasama bilateral antara Indonesia dan Filipina dalam isu keamanan perbatasan dipererat ketika Presiden Rodrigo Duterte melakukan kunjungan pertamanya ke Indonesia pada bulan September 2016, tepat tiga bulan setelah resmi menjabat sebagai Presiden Filipina. Dalam kunjungan yang mempertemukan Presiden dari kedua negara, isu keamanan perbatasan menjadi pembicaraan atau juga topik utama yang diusung oleh kedua kepala negara, mulai dari Laut China Selatan, perdagangan narkoba, hingga masalah pembajakan dan kelompok ekstrimis menjadi perundingan menarik yang bertempat di Istana Negara, Jakarta tersebut (Parameswaran, 2016).

Selanjutnya sebagai upaya tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan ini, dikeluarkan kesepakatan dalam bentuk *joint declaration* antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Filipina serta Malaysia pada Mei 2016 yang juga sepakat

untuk meningkatkan keamanan wilayah perairan negaranya dengan menyetujui tindakan patroli bersama, tindakan dalam menghadapi penyanderaan, dan tukar-menukar informasi. Selain itu juga disepakati pembukaan *hotline* dan *crisis center* serta penyusunan *Standard Operational Procedure* (SOP) (Djelantik, 2016, hal. 14). Tidak hanya sebatas pembicaraan pada kunjungan kenegaraan setingkat Presiden saja, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L.P. Marsudi juga mengajak negara-negara anggota ASEAN terutama Filipina untuk meningkatkan kerjasama terkait isu keamanan perbatasan ini. Hal tersebut disampaikan ketika beliau menghadiri ASEAN *Ministrial Meeting* (AMM) Retreat yang dilaksanakan di Filipina pada April 2017 yang lalu (KEMLU, 2017).

Pada peningkatan kerjasama keamanan perbatasan Indonesia dan Filipina, yang menjadi fokus saat ini adalah pemberantasan kelompok kejahatan lintas batas dan pelaku pembajakan kapal di wilayah perbatasan kedua negara serta pengamanan warga negara Indonesia maupun Filipina dari ancaman yang disebabkan oleh kelompok kejahatan tersebut. Hal tersebut terlihat dari kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L.P. Marsudi ke Filipina guna membahas penghentian ancaman kelompok tersebut bersama dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte di kota Davao pada Agustus 2017 yang lalu, yang mana keduanya sepakat untuk meningkatkan kerjasama keamanan perbatasan dan maritim guna memberantas kelompok Abu Sayyaf tersebut serta membahas proses retifikasi perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara (Jennings, 2018). Dalam kunjungan tersebut juga ditandatangani MoU kerjasama perhubungan oleh kedua kepala negara yang sekaligus meresmikan jalur Roll On-

Roll Off Davao-Bitung yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat kedua negara (Presiden, 2017).

Selain itu, para pelaku pembajakan yang merupakan kelompok Abu Sayyaf juga sudah sering dikaitkan dengan kelompok teroris sehingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga melakukan kerjasama dengan pihak Filipina yang diwakili oleh Departemen Luar Negeri Filipina dengan menandatangani Nota Kesepahaman di Jakarta pada 10 Agustus 2017. Nota kesepahaman ini akan menyediakan kerangka kerja untuk kerjasama dalam mencegah, menekan, memerangi terorisme internasional dan kejahatan lintas Negara (BNPT, 2017). Terbaru, kedua negara sepakat dan telah selesai dalam proses ratifikasi batas Zona Ekonomi Eksklusif. Hal tersebut disampaikan di sela-sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34 di Bangkok yang mana di dalam kesepakatan ratifikasi tersebut akan memberikan kepastian penegakan hukum dan peningkatan kerjasama di bidang maritim (kemlu.go.id, 2019).

Beberapa kerjasama tersebut dilakukan tentu untuk menekan angka ancaman yang terdapat di sekitar Laut Sulu. Ancaman seperti perompakan atau pembajakan kapal adalah sebuah kejahatan terorganisir yang merupakan masalah klasik yang telah dikenal sejak manusia memanfaatkan laut untuk kegiatan pelayaran demi keberlangsungan perdagangan. Sejarah Indonesia mencatat kegiatan pembajakan kapal sering terjadi sejak zaman kerajaan maritim besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Perkembangan teknologi dan kemajuan arus globalisasi mendukung terjadinya peningkatan kasus bajak laut di seluruh perairan dunia, dimana persentase kasus tersebut menunjukkan wilayah

Asia Tenggara sebagai lokasi dengan kasus yang tergolong cukup tinggi. Hal ini dapat terlihat pada sejarah yang mencatat beberapa suku pembajak yang terkenal dan mendapatkan perlindungan dari penguasa lokal mereka seperti pembajak Melayu, pembajak Bugis, pembajak Dayak, pembajak Iranum, dan pembajak Balangingi di Filipina (Dam, 2010, p. 99). Setelah usainya Perang Dingin, kasus pembajakan kapal kian memperlihatkan peningkatan aktivitas. Pada tahun 1992 terjadi 106 kali kasus pembajakan di dunia dan 73 kali diantaranya terjadi di wilayah Asia Tenggara dengan lokasi terbanyak terjadi di sekitar Pulau Bintan, Selat Philip, bagian utara pulau Sumatera, dan bagian selat Malaka (Dam, 2010, p. 100).

Pada tahun 2016 The International Maritime Bureau (IMB) memberi laporan mengenai kasus bajak laut di Selat Malaka yang menurun drastis sepanjang tahun 2015 dan 2016 (BBC, bbc.com, 2016). Patrolii dari tiga negara tepi yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura dianggap berhasil dalam menangani kasus ini. Saat kasus perompakan kapal di Selat Malaka mengalami angka penurunan, Laut Sulawesi - Laut Sulu menjadi perhatian banyak negara karena terjadi peningkatan kasus pembajakan kapal niaga di wilayah perairan tersebut terutama pada tahun 2016. Model kejahatan berulang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berdomisili dalam pulau-pulau kecil yang terletak di perairan Sulu dan disebut sebagai Kepulauan Sulu diantaranya Pulau Sibutu, Tawi-tawi, Jolo dan Basilan. Dalam sejarahnya, terdapat beberapa kelompok bajak laut dari Filipina Selatan kepulauan yaitu kelompok Lanun, Balangingi dan Mindanao (Lapian, 2009, p. 41). Berdasarkan laporan dari IMB yang berpusat di Kuala Lumpur,

Malaysia, untuk tahun 2015 setidaknya telah terjadi 11 kali serangan di wilayah ini yang berupa perampokan bersenjata (Espanilla, 2016).

Pada tahun 2016, modus kejahatan semakin meningkat bukan sekedar perampokan namun pembajakan dengan menyandera awak kapal dan meminta uang tebusan dengan jumlah yang sangat tinggi kepada pihak keluarga atau perusahaan kapal. Dalam laporan ReCAAP (*Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against ships in Asia*) sepanjang tahun 2016 terjadi 16 kali kasus penyanderaan kru kapal di Laut Sulawesi-Laut Sulu. Pada tanggal 26 Maret 2016 terjadi pembajakan Kapal Brahma 12 serta penyanderaan terhadap 10 ABK warga negara Indonesia, di awal April terjadi pembajakan terhadap kapal berbendera Malaysia yaitu kapal MV Massive 6 dan menyandera sebanyak 4 ABK Malaysia, kemudian pada pertengahan April 2016 kembali terulang pembajakan terhadap kapal TB Henry dan Cristi dengan korban 4 ABK warga Indonesia, dan pada bulan Juni kapal TB Charles 001 dan Robby 152 dibajak beserta 7 ABK yang ikut disandera. Selanjutnya pada bulan Juli 2016 terjadi dua kali insiden terhadap kapal Indonesia Fishing Trawler dan kapal Malaysia Serudong 3. Disusul insiden pada bulan September di tahun yang sama sebanyak satu kasus kapal Fishing Trawler, bulan Oktober kapal Dong Bang Giant 2, bulan November sebanyak 6 kasus dan bulan Desember 2 kasus (ReCAAP, Annual Report Piracy and Armed Robbery Against Ships In Asia 2016, 2016, p. 22).

Kejahatan bajak laut yang terjadi di wilayah Laut Sulawesi-Laut Sulu dilakukan oleh kelompok separatis yang mendiami pulau-pulau kecil terbelakang di Selatan Filipina, antara lain Pulau Jolo, Basilan, Tawi-tawi dan Mindanao.

Kelompok ini merupakan gerakan perlawanan yang lahir dari organisasi yang menuntut kemerdekaan pada pemerintah Filipina. Kelompok ini dikenal dengan nama Abu Sayyaf, yang belakangan melakukan aksi kejahatan laut tanpa memandang status kewarganegaraan korbannya. Pergerakan politik Abu Sayyaf kini mengalami pergeseran pada aksi-aksi penculikan untuk menuntut uang tebusan, daripada menyiapkan berdirinya sebuah negara Islam di Asia Tenggara, seperti tujuan awal dibentuknya organisasi tersebut. Penguasaan wilayah pulau-pulau kecil dengan hutan sebagai markas komando dan aksi kejahatan dilakukan di wilayah perairan didukung oleh kontur geografis Filipina bagian selatan. Terletak di antara Laut Cina Selatan, Laut Filipina dan Laut Sulawesi, juga terlindung di balik kepulauan selatan Filipina termasuk Palawan dan Mindanao serta pulau – pulau kecil lainnya yang dekat dengan Sabah di Kalimantan. Namun, lokasi terpencil sebenarnya menawarkan keuntungan bagi kelompok bajak laut karena kegiatan mereka sulit dideteksi oleh pihak berwenang. Tidak mengherankan jika kelompok militan seperti Abu Sayyaf berani bertindak seperti menahan, merampok dan menculik nelayan dan anak kapal yang berlayar di situ, bahkan mereka juga tidak ragu memenggal kepala korban jika terpaksa.

Kelompok ini diperkirakan memiliki ratusan gerilyawan aktif yang memiliki kemampuan menggunakan medan hutan pegunungan di pulau-pulau terdekat sebagai basis melakukan operasi penculikan di laut. Permukaan bumi yang kasar di pulau – pulau di perairan bersama Indonesia dan Malaysia di pulau Kalimantan “membolehkan” kelompok – kelompok teroris seperti Jemaah Islamiyah untuk melatih, mempertahankan dan membesar dengan penuh kebebasan. Wilayah otonomi Muslim Mindanao di Laut Sulu adalah markas bagi

kelompok militan lainnya termasuk Abu Sayyaf dan Barisan Pembebasan Moro Islam. Dengan mengambil keuntungan dari perbatasan keropos di kawasan itu, kelompok – kelompok ini telah mampu melatih, mempertahankan dan beroperasi dengan bebas di seluruh wilayah. Masalah di Sulu ini lebih pelik karena insiden penculikan selalu terjadi di luar wilayah kerja tantara Indonesia maupun Filipina atau juga Malaysia. Kejahatan berupa gangguan keamanan laut yang melibatkan kelompok ini sebenarnya sudah lama terjadi. Pertama kali pada tahun 1991 dengan kasus pelemparan granat ke kapal Doulos (News, 2007).

Gambaran tingkat kesejahteraan dan perekonomian yang rendah di wilayah pesisir selatan Filipina seolah menjadi pemicu berkembang dan berevolusinya kelompok Abu Sayyaf untuk dapat melakukan tindak terorisme dengan menargetkan sasaran maritim yang lebih mudah. Filipina memang tidak mengalami serangan atau juga pengeboman dalam skala yang besar seperti yang terjadi pada awal tahun 2000-an, akan tetapi permasalahan baru yakni penculikan untuk mendapatkan tebusan memicu kekhawatiran bahwa kelompok Abu Sayyaf sedang berusaha memanfaatkan kesadaran yang lemah dari pemerintah Filipina terhadap wilayah perairan mereka untuk dapat menciptakan serta membiayai operasi baru di wilayah tersebut. Untuk dapat secepat mungkin membatasi ancaman ini, membutuhkan pemahaman yang luas tentang jenis atau model serangan seperti ini serta mengapa mereka memilih model serangan seperti ini untuk dilakukan.

Pada 1990-an dan awal 2000-an, kelompok Abu Sayyaf menerima dana besar dari jaringan global organisasi Islam radikal yang mencakup, antara lain, Al Qaeda dan Jemaah Islamiyah (Mapping Militant Organizations: Abu Sayyaf

Group, 2018, p. 2). Perubahan dalam kepemimpinan ASG dan langkah-langkah anti-terorisme global yang mengikuti serangan 11 September 2001, melemahkan hubungan internasional ini, dan pada akhir 2000-an kelompok Abu Sayyaf jauh lebih tergantung pada penculikan dan pemerasan di Filipina selatan. Penculikan lebih sering terjadi di darat sampai kelompok ini dan afiliasinya beralih ke laut pada awal 2016, mungkin sebagai tanggapan atas efektivitas *Malaysian Eastern Sabah Security Command* (ESSCOM) dan serangan militer Filipina yang mengurangi wilayah operasi kelompok Abu Sayyaf (Amling, 2009, p. 34).

Dalam insiden penculikan, tujuan utama para penyerang adalah menyandera anggota kru kapal yang dianggap sebagai target bernilai tinggi, seperti perwira tinggi dan insinyur atau bahkan para pejabat. Biasanya, anggota kru diculik dari kapalnya dan dibawa ke lokasi yang dirahasiakan di darat sementara para penyerang lainnya menegosiasikan tebusan. Tidak seperti perompakan di perairan Somalia dimana pelaku biasanya menahan kapal dan sandera kru, jenis serangan di perairan Sulu ini dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga memungkinkan para penculik melarikan diri sebelum pihak keamanan turun tangan. Oleh karena itu, para pelaku menganggap bentuk penculikan ini sebagai "risiko rendah, namun berhadiah tinggi".

Selama masa penahanan, para penculik menghubungi anggota keluarga sandera secara langsung dan menggunakan media sosial untuk menekan pemerintah agar memenuhi tuntutan tebusan. Terkadang kelompok-kelompok ini menghubungi anggota keluarga untuk menyampaikan ancaman. Kemudahan dimana video intimidasi dapat dipublikasikan telah mendorong kekhawatiran yang ditujukan untuk memaksa pembayaran uang tebusan. Sejak 2014, enam sandera

telah dipenggal. Pemenggalan kepala juga digunakan untuk membalas serangan pemerintah. Pada puncak negosiasi demi tebusan di tahun 2016, tekanan terhadap video-video ini dan pembayaran yang dihasilkan meningkat ke titik yang menyebabkan ketegangan internasional atas kebijakan negosiasi tebusan dan ancaman yang tidak kunjung usai (Reporters, 2016).

Selain ancaman perompak atau pembajak kapal, ancaman lain yakni ancaman terorisme maritim juga menghantui wilayah Laut Sulu.

Gambar 1.1 Laut Sulu



(Sumber : <https://www.mapsofworld.com/philippines/maps/philippines-road-map.jpg>)

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa wilayah perairan Sulu merupakan wilayah yang sangat strategis baik dalam tujuan mobilitas kerjasama Indonesia dengan Filipina, maupun untuk tujuan perdagangan yang melibatkan kapal-kapal niaga cukup banyak melintas disana. Hal tersebut tentu menyebabkan

wilayah ini menjadi sangat rentan terhadap gangguan dari eksternal maupun internal. Maraknya gangguan aksi penculikan dan perompakan terhadap kapal-kapal yang melintas menunjukkan bahwa sistem pengamanan di wilayah tersebut masih tergolong lemah. Apabila hal ini tidak segera ditangani dengan serius maka dikhawatirkan dapat membuka peluang bagi banyak kelompok-kelompok kejahatan atau bahkan juga jaringan terorisme untuk melakukan aksinya di sekitar wilayah tersebut.

Kekhawatiran terbesar negara-negara di dunia salah satunya adalah serangan terorisme. Serangan terorime pada 11 September 2011 telah mengubah pandangan internasional terhadap keamanan global. Terorisme menjadi ancaman yang sangat mengemuka sehingga konsep keamanan di setiap negara mengalami perubahan secara mendasar dari konsep lama yang lebih mengedepankan pendekatan konvensional menjadi konsep baru yang lebih komprehensif. Nuansa penanganan masalah terorisme telah mempengaruhi hubungan antar negara dengan semakin menguatnya kerjasama dalam bidang pertahanan yang menempatkan isu terorisme sebagai agenda utama.

Pasca terjadinya serangan 11 September 2001, Asia Tenggara menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus dari dunia internasional karena Kawasan Asia Tenggara dinilai sebagai Kawasan yang labil secara politik maupun juga ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat ketika krisis ekonomi melanda dunia tahun 1998, Asia Tenggara juga mengalami permasalahan dengan lahirnya gerakan-gerakan yang menentang pemerintah termasuk gerakan separatisme.

Jika kita amati, telah terjadi pergeseran atas aksi terorisme belakangan ini. Perubahan tersebut ialah terkait dengan *scope* atau area serangan terorisme yang mana sepertinya sudah tidak terbatas pada satu kawasan tertentu saja, misalnya terjadi konflik atau aksi terorisme di suatu kawasan namun ketegangan atau situasi yang sama terjadi di Kawasan lain yang berada jauh dari lokasi utama konflik. Hal tersebut dapat terjadi karena bisa saja terdapat indikasi suatu kepentingan dari salah satu pihak yang berasal dari Kawasan yang berada jauh dari lokasi utama kejadian tadi.

Kemudian selanjutnya perubahan mengenai target incaran dari tindak terorisme ini telah berubah dimana tidak lagi menargetkan atau menyerang *hard target* seperti instalasi militer atau armada perang karena sudah dapat dipastikan akan semakin sulit untuk mendapatkan kepentingan mereka karena terdapat pengawalan serta kemampuan untuk menghentikan serangan tersebut. Namun saat ini target atau sasaran dari tindak terorisme ini adalah *soft target* yang secara fisik tidak memiliki pengawalan serta kemampuan untuk mencegah dan menghentikan terjadinya serangan sehingga lebih mudah menimbulkan kekacauan serta korban yang mana pada akhirnya akan memudahkan mereka dalam mendapatkan kepentingan yang mereka inginkan.

Pasca serangan 11 September 2001, telah tumbuh kekhawatiran bahwa Kawasan Asia Tenggara akan ikut menjadi sasaran terorisme terhadap industry atau aktifitas pelayarannya. Barry Desker mengatakan bahwa hal ini juga terlihat seperti serangan kelompok Al Qaeda terhadap USS Cole di teluk Aden pada bulan Oktober 2000 dan super tanker milik Perancis di lepas pantai Aden pada bulan Oktober 2002. Lalu hal tersebut disusul dengan kejadian pengeboman *super ferry*

oleh jaringan kelompok Al Qaeda yakni kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina pada bulan Februari 2004 yang menjadi salah satu aksi terorisme maritime terburuk yang pernah terjadi karena mengakibatkan lebih dari 100 orang menjadi korban jiwa (Desker, 2005).

Kekhawatiran tersebut tentu sangat berdasar karena kepentingan strategis perairan di Asia Tenggara salah satunya adalah perairan Sulu yang menjadi perbatasan Indonesia dan juga Filipina terutama dari perspektif ekonomi dan juga keamanan. Hal tersebut tentu juga selaras dengan pemikiran bahwa isu-isu keamanan seperti ini lebih penting daripada perlombaan untuk memperkuat persenjataan seperti senjata pemusnah massal contohnya. Singkatnya, pemikiran tersebut menciptakan perspektif ancaman yang melebihi kekhawatiran terhadap kekuatan militer dan cukup merusak sistem-sistem hubungan antarnegara. Setidaknya ada tiga masalah yang perlu diperhatikan dalam hal ini:

1. Diperlukan kerjasama antarnegara dalam melakukan perlawanan terhadap Gerakan terorisme global.
2. Dalam penangkapan pelaku tindak terorisme harus dilawan sampai ke akarnya sehingga mempersempit pergerakan jaringan terorisme.
3. Dalam menjalankan usaha-usaha represif diperlukan langkah yang diambil untuk mencegah tindakan-tindakan terorisme yang mungkin akan terjadi. Hal tersebut bukan hanya tanggung jawab pihak keamanan dan juga pemerintah, tetap menjadi tanggung jawab seluruh aspek institusi yang terkait termasuk lapisan masyarakat sendiri (Interpol, 2003).

Keamanan laut juga merupakan elemen utama dalam “*Global War on Terrorism*” yang diprakarsai oleh Amerika Serikat yang kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana keseluruhan strategi keamanan maritim dan tingkat komitmen dari komponen strategi itu mampu memberikan pemahaman tentang sifat dan kemungkinan serangan teroris yang potensial. Banyak wilayah yang tidak sepenuhnya dikontrol pemerintah, mengakibatkan sebagian besar atau hampir 80 persen penyelundupan senjata dilakukan melalui laut menuju daerah-daerah konflik di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa terorisme sudah mampu masuk kedalam wilayah Asia Tenggara yang terbuka.

The Council for Security cooperation in the Asia Pacific (CSCAP) memberikan definisi maritime terrorism:

“...*the undertaking of terrorist acts and activities within the maritime environment, using or against vessels or fixed platforms at sea or in port, or against any one of their passengers or personnel, against coastal facilities or settlements, including tourist resorts, port areas and port towns or cities.*” (Wee, 2017, p. 33)

Definisi ini tidak secara langsung memberikan pemahaman mengenai apa yang dimaksud terorisme dan apakah hal ini hanya termasuk penyerangan di laut yang melibatkan kapal sipil atau bahkan melawan armada militer. Sehingga pendefinisian terorisme maritim ini dapat dikatakan sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan terhadap kapal sipil maupun militer, penumpang maupun awak kapal, kargo, fasilitas pelabuhan yang tujuannya semata mata untuk politik. Definisi ini dapat diperluas mencakup penggunaan sistem transportasi maritim

untuk menyelundupkan teroris ke negara sasaran. Dengan kata lain definisi yang digariskan oleh CSCAP dapat memberikan celah dimana secara eksplisit membatasi bahwa terorisme maritim hanya menyangkut puncak kegiatan teroris yang dilakukan di laut. Sebagai contoh, jaringan teroris yang sedang menyelundupkan senjata atau bahan peledak tidak termasuk ke dalam kategori terorisme maritim karena tidak diarahkan pada personel, kapal, atau bangunan di wilayah pesisir. Oleh sebab itu, sudah selayaknya bila terorisme maritim didefinisikan pada suatu tindakan atau kegiatan yang tidak hanya menyangkut aksi langsung terhadap aspek maritim tetapi segala sesuatu yang terkait dengan terorisme yang dilakukan di lautan.

Melalui beberapa upaya serta kerjasama yang telah dilakukan oleh kedua negara, maka diharapkan akan terjadi perubahan yang lebih positif dalam upaya mengurangi aksi pembajakan yang mengganggu masyarakat Indonesia maupun Filipina yang beraktivitas di sekitar wilayah perbatasan kedua negara. Dengan kerjasama yang semakin intensif serta upaya bersama baik dari pemerintah maupun yang bukan dari pemerintah, diharapkan mampu untuk menanggulangi isu pembajakan yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis Filipina secara cepat dan efektif.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah memahami latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah, yaitu: Bagaimana efektivitas kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menghadapi isu pembajakan kapal di wilayah perbatasan pada tahun 2016-2018 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari penyampaian materi yang disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Mengetahui bagaimana efektifitas kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menghadapi isu pembajakan kapal di wilayah perbatasan pada tahun 2016-2018.

1.4. Signifikansi

Dalam pembahasan tentang disiplin ilmu Hubungan Internasional, tentu tidak akan terlepas dari isu keamanan dunia internasional yang mana isu keamanan internasional ini telah lama menjadi perbincangan banyak pihak dalam pandangan dunia internasional. Salah satu bentuk dari isu keamanan internasional tersebut adalah peningkatan keamanan di wilayah perbatasan. Demi merealisasikan hal tersebut, negara-negara di dunia tentu perlu mengadakan kerjasama dengan negara lain terkait permasalahan perbatasan wilayah ini. Filipina dan Indonesia menjadi contoh negara-negara yang bekerjasama dalam upaya peningkatan keamanan perbatasan kedua negara. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas perundingan kedua negara meningkat dalam hal peningkatan keamanan perbatasan karena terjadinya beberapa aksi pembajakan kapal yang dilakukan oleh kelompok separatis Abu Sayyaf di sekitar wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina. Isu ini patut untuk dibahas karena merupakan isu yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan kerjasama kedua negara saat ini. Selain itu, publik dari kedua negara terutama masyarakat yang melakukan aktifitas di sekitar perbatasan Indonesia dan Filipina mengharapkan agar aksi pembajakan oleh kelompok separatis ini dapat segera terselesaikan dan dapat

memberikan rasa aman kepada mereka. Penelitian ini juga dilakukan karena belum adanya penelitian yang lebih spesifik pada tahun 2016-2018 seperti yang menjadi cakupan pada penelitian ini. Di akhir penelitian juga akan dipaparkan upaya apa saja yang seharusnya ditempuh oleh kedua negara untuk meminimalisir aksi pembajakan ini lagi sekaligus memeberikan rekomendasi terutama kepada pemerintah Indonesia.

1.5. Cakupan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis membatasi cakupan penelitian yang akan membantu penulis untuk fokus pada tujuan penelitiannya dan juga tidak melebar dari permasalahan yang hendak di teliti. Penelitian ini berfokus pada bagaimana efektifitas kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menghadapi isu pembajakan kapal setelah terjalannya beberapa kerjasama dan upaya-upaya yang sudah dilakukan beberapa tahun belakangan. Penelitian ini juga dibatasi dengan pengambilan data yang hanya akan diambil pada tahun 2016-2018 karena pada tahun 2016 yang mana sangat ramai dan melonjaknya angka pembajakan kapal di wilayah perairan Laut Sulu, juga bertepatan dengan baru naiknya Rodrigo Duterte sebagai presiden baru Filipina dan juga langsung menanggapi masalah ini dengan begitu serius.

1.6. Tinjauan Pustaka

Indonesia dan Filipina sebenarnya sudah menghadapi permasalahan pembajakan kapal di wilayah perbatasan kedua negara sejak cukup lama, namun situasi di perbatasan tersebut tidak kunjung mereda. Saat ini kedua negara

semakin gencar untuk meningkatkan kekuatannya menghadapi para pembajak di wilayah perairan Sulu yang menjadi perbatasan keduanya ditambah dengan bergabungnya Malaysia dalam kerjasama peningkatan kekuatan di wilayah perairan negara-negara tersebut. Ketiga negara inipun membentuk kerjasama trilateral untuk menekan aksi pembajakan dan aktivitas ilegal lainnya yang berada di wilayah perairan perbatasan ketiga negara tersebut yang sekaligus menjadi kepentingan serta keamanan nasional masing-masing negara (Ariani, 2018).

Namun meskipun telah melakukan beberapa kerjasama serta menerapkan kebijakan di wilayah perbatasan Laut Sulawesi dan Laut Sulu, pemerintah Filipina maupun pemerintah Indonesia belum juga mampu menurunkan angka permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut. Kedua negara masih kesulitan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan keduanya. Meskipun sudah melakukan banyak kerjasama dan melibatkan banyak pihak, namun tetap saja permasalahan di wilayah perbatasan kedua negara tidak kunjung reda (Febrica, 2014, hal. 64-67). Selain melakukan kerjasama internasional, negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan juga Malaysia memperkuat kekuatan pertahanan dan keamanan dalam negerinya dengan membangun Pusat Komando Angkatan Laut (Puskodal) di wilayah Batam dan Belawan, dan menempatkan pasukan khusus untuk menangani aksi pembajakan dan perompakan. Sementara Malaysia membangun radar di sepanjang selat Malaka dan selat Singapura untuk mengontrol lalu lintas kapal di kawasan tersebut (Ho, 2006, hal. 565-566).

Banyaknya permasalahan di sekitar perairan Sulu yang menjadi perbatasan Indonesia dan Filipina tentu bukan tanpa alasan. Nilai strategis di wilayah ini

menyimpan banyak kekayaan alam dan menjadi jalur perdagangan yang cukup strategis menjadikan kawasan ini target menggiurkan bagi para pembajak untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tidak hanya pembajakan kapal, masalah seperti illegal fishing, penyelundupan senjata, hingga perdagangan manusia menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan jika tidak ingin permasalahan-permasalahan tersebut terus hadir dan semakin mengganggu kedaulatan kedua negara (Rustam, 2017, hal. 167-173). Dengan banyaknya permasalahan yang hadir di kawasan tersebut dan juga beberapa wilayah perairan Asia Tenggara, tentu menarik perhatian pihak-pihak diluar organisasi kerjasama ASEAN untuk turut mengamati permasalahan tersebut. *International Maritime Bureau* (IMB) misalnya yang memiliki data penyerangan dan pembajakan kapal di wilayah perairan Asia Tenggara mulai tahun 1993 hingga 2006. ReCCAP (*Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia*) pun mengamati berbagai “tren” atau cara para pembajak dalam menjalankan aksinya (Liss, 2014).

Terlepas dari adanya bantuan dari pihak luar, Indonesia dan Filipina serta negara Asia Tenggara lainnya harus dapat membuktikan bahwa mereka dapat menyelesaikan permasalahan ini sendiri. Hal-hal seperti memahami sejarah dan juga faktor yang mendorong terjadinya aksi pembajakan kapal ini akan membantu dalam menganalisa apa saja yang dibutuhkan untuk dapat menekan jumlah aksi pembajakan di wilayah perbatasan dan perairan Asia Tenggara secara keseluruhan (Young, 2007).

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba untuk melakukan penelitian tentang efektivitas kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menghadapi kasus pembajakan di wilayah perbatasan kedua negara yang cukup berkaitan dengan beberapa tulisan pada bagian tinjauan pustaka. Tulisan-tulisan yang penulis cantumkan pada bagian tinjauan pustaka kebanyakan membahas tentang kerjasama negara-negara Asia Tenggara namun tidak secara spesifik menjelaskan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina yang dapat secara efektif mengurangi aksi pembajakan kapal di wilayah perbatasan kedua negara tersebut. Dalam tulisan-tulisan tersebut juga menjelaskan hal apa saja yang perlu ditingkatkan dan tren atau cara apa saja yang digunakan oleh para pembajak dalam menjalankan aksinya. Namun hal tersebut merupakan upaya lama yang tentunya sudah berbeda dengan saat ini seperti penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Tidak terdapatnya upaya konkrit untuk dapat meminimalisir aksi pembajakan ini juga menjadi kekurangan dalam tulisan-tulisan tersebut.

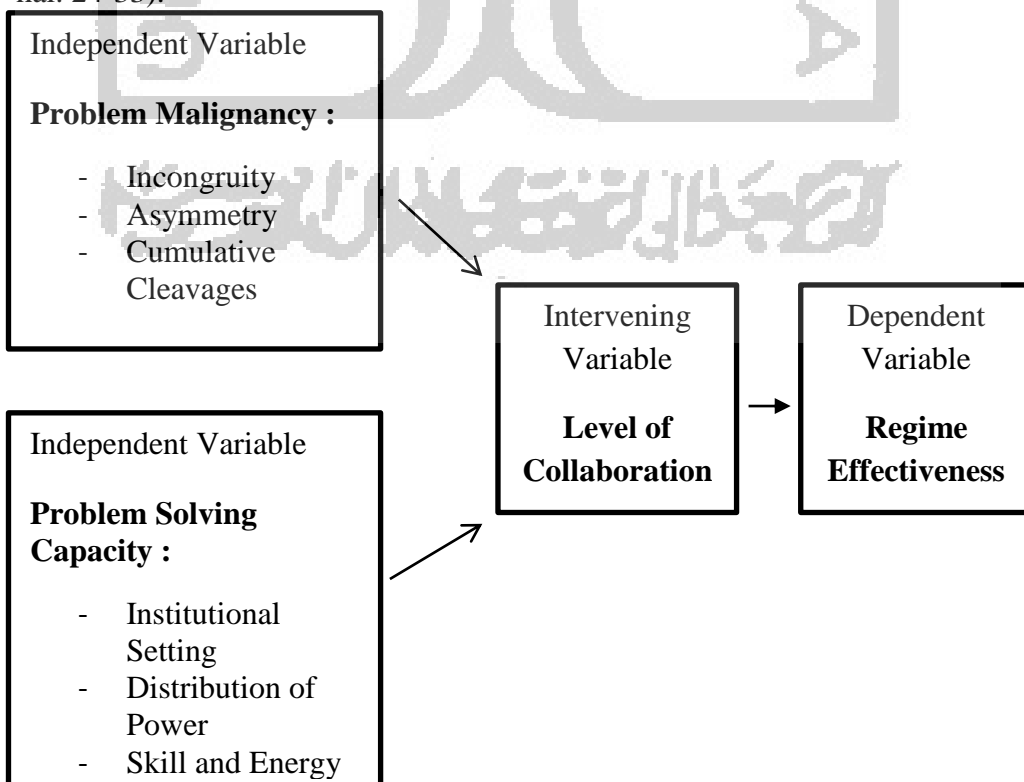
1.7. Landasan Teori / Konsep

Sebagai pedoman bagi penulis untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penulis mengajukan kerangka teori sebagai acuan dalam penelitian ini, yang mana kerangka teori yang akan digunakan adalah efektivitas rezim yang dikemukakan oleh Arild Underdal. Menurut Arild Underdald, rezim merupakan seperangkat aturan dan norma yang dirancang untuk mengatur sebuah kegiatan atau isu tertentu (Underdal, 2001, hal. 1). Dalam melihat efektivitas suatu rezim yang dalam hal ini adalah kerjasama antara Indonesia dan Filipina, terdapat berbagai upaya dalam menciptakan kerjasama tersebut sekaligus juga untuk

mengimplementasikannya. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa terdapat suatu rezim yang berhasil dan juga suatu rezim yang dikatakan tidak berhasil atau gagal yang sekaligus menegaskan bahwa tingkat keberhasilan suatu rezim berbeda-beda (Underdal, 2001, hal. 1). Penyebabnya ada dua hal menurut Arild Underdal, yakni karakter atau jenis dari permasalahan itu sendiri dimana terdapat beberapa masalah yang tidak terlalu rumit dan secara politik dikatakan lebih ramah dan karena itu lebih mudah untuk ditangani. Sedangkan penyebab yang kedua adalah terfokus pada *problem solving capacity* yang mana terdapat beberapa masalah yang sukses ditangani karena institusi yang lebih kuat atau juga kemampuan pemecahan masalah yang lebih tinggi (Underdal, 2001, hal. 1-2). Dalam buku “*Environmental Regime Effectiveness : Confronting Theory with Evidence*”, Arild Underdal menyebutkan variabel yang terkait dengan efektivitas rezim yakni variabel dependen yang merupakan efektivitas rezim itu sendiri, dan variabel independent yang terdiri dari dua hal : tipe permasalahan (*problem malignancy*) dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan (*problem solving capacity*) tersebut serta juga *intervening variable* yang merupakan akibat dari variabel independent namun juga menjadi bagian dari variabel dependent (Underdal, 2002, hal. 4). Terkait problem malignancy dalam variabel independent, Underdal menjelaskan tiga indikator pembentuknya yakni : *Incongruity* atau perbedaan pemahaman terkait dengan tujuan dibentuknya suatu rezim, lalu *Assymmetry* yaitu perbedaan kepentingan nasional anggota yang terlibat dalam rezim, yang mana akan menjadi masalah karena tentu dalam hal ini Indonesia dan Filipina memiliki kepentingan nasional masing-masing dan ditambah dengan kecurigaan satu sama lain ketika nanti melaksanakan kegiatan

operasi keamanan bersama karena dianggap akan mengganggu kedaulatan negara masing-masing. Lalu *Cumulative Cleavages* atau perbedaan yang terakumulasi baik itu perbedaan kepentingan, pemahaman, dan lainnya seperti misalnya perbedaan power, masalah keamanan perairan yang dihadapi lainnya, atau bahkan juga perbedaan luas wilayah (Underdal, 2002, hal. 17-21).

Sementara itu, terkait dengan *problem solving capacity* dalam variabel independent terdapat tiga indikator pembentuknya yakni : *Institutional Setting* yang mana merupakan kemampuan suatu rezim dalam mengatur serta menentukan peran masing-masing anggota rezim dan juga konsistensi dalam menjaga rezim tersebut. Selanjutnya adalah keterlibatan *Distribution of Power* yang mana dalam suatu rezim membutuhkan power dari masing-masing anggota agar tidak ada anggota yang dominan dalam rezim tersebut. Dan yang terakhir adalah *Skill* dan *Energy* yang ditandai dengan *epistemic community* atau sebuah jaringan profesional yang terdiri atas Negara-negara atau organisasi dengan keahlian dan kompetensi yang diakui dalam bidang tertentu atau area tertentu (Underdal, 2002, hal. 24-33).



Problem Solving Capacity dan *Problem Malignancy* inilah yang nantinya akan mempengaruhi *level of collaboration* sebagai intervening variable dan dari sinilah kita dapat menilai efektif atau tidaknya suatu rezim. Terdapat lima *level of collaboration* yang mana semakin tinggi level yang dicapai suatu rezim, maka dapat dikatakan semakin efektif pula rezim tersebut. Lima level tersebut adalah :

0. Gagasan bersama tanpa suatu koordinasi tindakan bersama
1. Koordinasi tindakan secara diam-diam
2. Koordinasi tindakan dengan dasar aturan atau standar yang dirumuskan secara eksplisit, namun implementasi berada sepenuhnya di tangan pemerintah sebuah negara. Tidak ada penilaian terpusat mengenai efektivitas dari sebuah tindakan.
3. Koordinasi tindakan dengan dasar aturan atau standar yang dirumuskan secara eksplisit, namun implementasi berada sepenuhnya di tangan pemerintah sebuah negara. Terdapat penilaian terpusat akan efektivitas dari sebuah tindakan.
4. Koordinasi yang terencana, dikombinasikan dengan implementasi pada level nasional. Didalamnya terdapat penilaian terpusat akan efektivitas sebuah tindakan.
5. Koordinasi dengan perencanaan dan implementasi yang menyeluruh terintegrasi, dengan penilaian terpusat akan efektivitas (Underdal, 2002, hal. 7).

Dari skala tersebutlah kita dapat melihat pada level berapa dan sejauh mana efektivitas kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menghadapi permasalahan pembajakan kapal di wilayah perbatasan kedua negara.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metodologi ialah merupakan suatu uraian tentang metode dan merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan. Dalam setiap penelitian pasti melibatkan tentang bagaimana cara peneliti menggunakan metode dalam menganalisa suatu kasus yang ia angkat. Nantinya, metode yang ia pilih akan menentukan arah, hasil, serta kesimpulan dari penelitiannya. Metodologi berasal dari dua kata, yaitu “metode” dan “logos”. Dikarenakan menerapkan suatu metodologi, maka nantinya akan ada penelitian dan penelitian sendiri berarti kegiatan yang dilakukan untuk menyusun semua bentuk data hingga menjadi suatu laporan (Anonymous, 2006). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif sebagai media untuk menguraikan data yang akan diambil. Menurut Strauss dan Corbin dalam buku Creswell, J. (1998:24), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran), serta secara umum digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, maupun aktivitas sosial (Rahmat, 2009).

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kerjasama Indonesia dan Filipina sebagai rezim internasional,

Negara Filipina, dan Negara Indonesia. Rezim kerjasama antara Indonesia dan Filipina ini menjadi wadah yang sekaligus memfasilitasi dalam upaya kedua negara menghadapi ancaman keamanan yang disebabkan oleh pembajakan kapal di Laut Sulu yang menjadi perbatasan kedua negara. Efektivitas Kerjasama Indonesia dan Filipina sebagai sebuah forum internasional atau bisa disebut rezim yang menangani masalah ini akan dilihat, apakah berhasil mencapai tujuan utama atau bahkan tidak bisa menangani masalah mengenai isu pembajakan kapal yang mengganggu keamanan dan kedaulatan kedua negara.

1.8.3 Alat Pengumpul Data

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode Kualitatif ini, penulis sepenuhnya akan menggunakan data sekunder. Data sekunder disini adalah data yang telah disediakan oleh berbagai pihak lain yang telah melakukan penelitian baik langsung maupun tidak langsung dari sumber. Penulis menggunakan hasil data-data yang telah didapatkan oleh para peneliti sebelumnya yang berbentuk dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto- foto, gambar dan dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penelitian (Nilamsari, 2014, hal. 181). Dalam penelitian ini, studi pustaka yang akan digunakan berupa beberapa literature yang membahas tentang kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menghadapi permasalahan pembajakan kapal di wilayah perbatasan kedua negara. Kemudian studi pustaka yang akan digunakan juga untuk membahas mengenai konsep Efektivitas Rezim sebagai landasan konseptual skripsi ini. Sehingga pada akhir pembahasan akan didapatkan kesimpulan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bersifat analisis dengan menggunakan metode kualitatif, yang mana artinya terdapat tinjauan analisa mengenai permasalahan yang dibahas secara deskriptif. Oleh sebab itulah, maka diperlukan tahapan-tahapan dalam proses penelitian ini. *Tahap pertama* dimulai dengan pengumpulan data-data. Pada pengumpulan data melalui Studi Pustaka ini menggunakan data sekunder seperti buku, internet, media cetak, serta jurnal ilmiah. Dalam proses pengumpulan data ini kemudian penulis mengambil secara garis besar dari konsep yang ada akan digunakan dalam pembahasan. *Tahap kedua*, setelah pengumpulan data dan pemahaman konsep selesai, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah penulis memaparkan mengenai ancaman keamanan yang ada di kawasan perbatasan Indonesia dan Filipina atau juga di perairan Sulu serta bagaimana arti penting bagi kedua negara terhadap nilai strategis wilayah tersebut. *Tahap ketiga*, penulis menuliskan kerjasama yang dijalin kedua negara saat ini dalam menghadapi permasalahan keamanan perbatasan. *Tahap keempat*, penulis akan menganalisis serta memaparkan data temuan yang dapat menjadi indikator apakah kerjasama yang dijalin Indonesia dan Filipina dalam menghadapi ancaman keamanan di perbatasan telah efektif atau tidak. *Tahap kelima*, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil analisa yang telah dijelaskan dalam tahap sebelumnya.

BAB II

KERUMITAN MASALAH DAN KAPASITAS PENYELESAIAN MASALAH

2.1. KERUMITAN MASALAH

Pada bab ini, penulis akan mengaplikasikan analisis variabel kerumitan masalah (problem malignancy) dan kapasitas penyelesaian masalah (problem solving capacity) yang ada pada permasalahan pembajakan kapal di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina yakni wilayah perairan Laut Sulu. Terdapat 3 karakter dari variabel kerumitan masalah, yaitu Incongruity, Asymmetry, dan Cumulative Cleavages.

2.1.1 Incongruity

Incongruity berarti sebuah ketidaksesuaian atau sebuah keganjilan. Karakteristik yang menentukan dari kategori kerumitan masalah disini adalah mengenai pertimbangan cost and benefit yang dapat saja memunculkan sebuah bias yang didasari oleh pertimbangan konsekuensi material, perspektif yang digunakan dalam menghadapi pertimbangan cost and benefit itu sendiri atau keduanya. Jadi, aktor yang mementingkan kesejahteraannya sendiri hanya akan peduli terhadap semua kepentingannya dan tidak menghiraukan kesejahteraan aktor lain. Inti dari Incongruity ini adalah adanya ketidaksepahaman yang diakibatkan oleh para aktor anggota dari sebuah rezim itu menganggap sebuah isu sebagai permasalahan (Underdal, 2002, p. 3-45).

Dalam kerjasama antara Indonesia dan Filipina ini, terdapat permasalahan Incongruity yang dapat mengganggu jalannya kerjasama kedua negara. Hal tersebut menjadi permasalahan Incongruity karena di negara anggota dalam rezim kerjasama ini masih terdapat konflik yang disebabkan oleh pemerintah negara itu sendiri dengan kelompok masyarakat sipil yang menjadi awal mula lahirnya permasalahan utama yang melatar belakangi rezim kerjasama ini dibentuk.

Kasus kelompok separatis Abu Sayyaf

Wilayah Filipina bagian selatan dikenal sebagai wilayah dengan tingginya tingkat terjadinya konflik kekerasan dan pemberontakan. Terjadinya berbagai konflik di kawasan Filipina bagian Selatan atau tepatnya di Pulau Mindanao berawal ketika para penjajah dari Spanyol datang ke Filipina, tepatnya di Cebu pada tahun 1565 (Cullinane, 2019). Pada masa kolonialisasi tersebut, masyarakat di Filipina Selatan diberi nama sebagai orang Moro oleh penjajah Spanyol yang berasal dari kata *Moroz* kepada orang-orang Muslim, sedangkan orang-orang Kristen disebut dengan *Indios* (Guzman, 2013). Konflik bermula ketika para penjajah Spanyol mengklaim bahwa wilayah Filipina Selatan merupakan tanah jajahan mereka. Namun penduduk atau orang-orang Moro menyangkalnya karena mereka telah terlebih dahulu berada di wilayah tersebut dan menganggap wilayah Filipina Selatan sebagai suatu identitas mereka dan lebih dari itu, orang-orang Moro juga menerima diskriminasi sosial, politik, hingga ekonomi dari penjajah Spanyol (Lisa Huang, Victor Musembi, & Ljiljana Petronic, 2012, hal. 2).

Permasalahan tidak kunjung usai ketika bahkan Filipina telah menerima kemerdekaan dari Amerika Serikat pada tahun 1946 yang mana pada saat itu

banyak sekali masyarakat Kristen yang dibawa masuk mulai dari masa penjajahan sehingga membuat masyarakat Muslim Filipina Selatan menjadi minoritas di tanahnya sendiri. Pada tahun 1950an, yang berarti 10 tahun setelah negara ini merdeka, masih sangat banyak pemeluk agama Islam di Mindanao yang hidup di bawah garis kemiskinan karena semakin banyaknya jumlah orang Kristen dan diskriminasi terhadap Muslim di Filipina Selatan. Lambat laun kekuatan penduduk Kristen semakin dominan di Filipina dan membuat perekonomian Muslim Filipina semakin hari semakin tersisih (Huang, 2012, hal. 2).

Melihat gelagat tak baik dari hal ini, pemerintah akhirnya menginisiasi program integrasi. Pada 1957, didirikanlah Komisi Integrasi Nasional (CNI). Pemerintah Filipina lantas membuat program beasiswa edukasi bagi umat Muslim Filipina. Namun tak disangka jika pada akhirnya program ini menjadi awal mula tumbuhnya gerakan separatis di Filipina karena semakin banyak sentimen-sentimen anti Islam disana. Program Integrasi tersebut juga melahirkan tokoh-tokoh dengan pemikiran separatis dan salah satunya adalah Nur Misuari, seorang keturunan Tausug dari Sulu yang terlahir dari keluarga sangat miskin (Samosir, 2016).

Setelah terbentuknya Moro National Liberation Front (MNLF) oleh Nur Misuari yang seolah menjadi “inspirasi” kelompok separatis di Filipina, mulailah lahir kelompok-kelompok lain yang cukup besar dan berpengaruh yang merupakan pecahan dari MNLF. Ialah Moro Islamic Liberation Front dan juga kelompok Abu Sayyaf. MILF dibentuk pada tahun 1981 dan dipimpin oleh Salamat Hashim setelah memisahkan diri dari MNLF pada tahun 1978. Tidak jauh

berbeda dengan MNLF, MILF juga menuntut pemerintah Filipina memberikan kemerdekaan kepada Bangsamoro di Filipina bagian selatan (BBC, 2012).

Sementara itu berdeda dengan MILF, lahirnya kelompok Abu Sayyaf (ASG) merupakan bentuk dari kekecewaan beberapa anggota MNLF karena menerima tawaran diplomatik dari pemerintah Filipina dalam upaya pengembangan wilayah Bangsamoro pada tahun 1990an (University, 2015).

Kelompok Abu Sayyaf merupakan pecahan dari kelompok separatis MNLF. Lahirnya Kelompok ini pada tahun 1991 tidak terlepas dari proses perundingan yang berjalan antara MNLF dengan Pemerintah Filipina dalam negosiasi perdamaian atas konflik di Filipina Selatan. Pemberian Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) oleh Filipina sebagai solusi perdamaian untuk Bangsamoro dianggap sebagai solusi yang kurang memuaskan bagi Muslim di Moro. Selain itu, ketidakpuasan anggota terhadap kepemimpinan Nur Misuari di MNLF menjadi penyebab lain terpecahnya kelompok tersebut (Baskara, 2009, hal. 5).

Kelompok Abu Sayyaf pertama kali muncul pada tahun 1991 dibawah pimpinan Abu Razak Janjalani, seseorang yang pernah menempuh pendidikan di Ummu Qura Mekah selama kurang lebih 3 tahun. Ia merupakan anak dari tokoh ulama Basilan, Filipina. Abu Razak Janjalani juga merupakan lulusan Universitas Islam di Arab Saudi tahun 1981. Setelah lulus, ia kembali ke Filipina untuk berdakwah di tahun 1984. Kemudian, pada awal tahun 1987 dirinya bersama pejuang jihad asal Moro lainnya mengikuti kamp militer di Afganistan untuk berperang bersama pasukan Mujahidin Afganistan melawan Uni Soviet.

Kelompok ini dikenal sebagai kelompok separatis yang dominan berada di wilayah Filipina bagian Selatan (Mindanao) yang kerap melakukan tindak kekerasan dalam setiap aksinya (bbc, 2016).

Pada tahun 1989, Abu Razak Janjalani mulai mengumpulkan pasukan muslim Moro serta mengajak bergabung anggota MNLF yang kecewa akibat perpecahan internal yang terjadi di kelompok tersebut. Awalnya jumlah anggota inti dari kelompok buatan Abu Razak Janjalani hanya sekitar 30 orang. Namun, lama kelamaan jumlah tersebut bertambah. Kelompok tersebut awalnya menamakan diri mereka sebagai Harkat Al-Islammiyah. Namun, nama yang lebih dikenal dari kelompok tersebut adalah Abu Sayyaf yang berarti “Bapak Pedang” (Baskara, 2009, hal. 1).

Serupa dengan kelompok separatis di Filipina Selatan lainnya, tujuan utama keberadaan Kelompok Abu Sayyaf adalah menjadikan wilayah masyarakat Moro sebagai negara Islam yang merdeka dari pemerintahan Filipina. Jika mereka merdeka, masyarakat Moro dapat menjalankan syariat Islam sepenuhnya. Keinginan tersebut tidak akan pernah terwujud jika mereka tetap di bawah pemerintah Filipina. Atas dasar itu juga Kelompok Abu Sayyaf juga menentang otonomi pemberian pemerintah Filipina terhadap masyarakat Moro.

Meskipun tujuan Kelompok Abu Sayyaf serupa dengan kelompok separatis Filipina lainnya, hal yang membedakan terletak pada bentuk aksi teror yang mereka lakukan. Sempat terlibat dalam serangkaian pengeboman di Filipina, Kelompok Abu Sayyaf lebih dikenal dengan aksi penculikan dan penyanderaan sebagai upaya mendapat uang tebusan. Tindakan tersebut dilakukan

demikian menjamin keberlangsungan operasi mereka. Selain Filipina, serangkaian aksi penculikan dan penyanderaan juga dilakukan kelompok tersebut di wilayah negara Asia Tenggara lain. Hal tersebut kemudian membuat Kelompok Abu Sayyaf dicap sebagai kelompok teroris dan ekstrimis yang patut diwaspadai oleh berbagai negara di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia.

Selain itu, perbedaan lainnya antara Kelompok Abu Sayyaf dengan kelompok separatis lainnya di Filipina adalah keengganan untuk ikut melakukan negosiasi perdamaian dengan Filipina. Kelompok tersebut justru melakukan segala upaya demi menghalangi proses negosiasi perdamaian yang berlangsung antara pemerintah Filipina dengan kelompok separatis lain seperti MILF dan MNLF. Perbedaan sikap tersebut muncul karena pandangan Kelompok Abu Sayyaf yang hanya melihat pendirian negara Islam sebagai satu-satunya jalan untuk kesejahteraan masyarakat Moro, sehingga negosiasi perdamaian tidak lagi diperlukan.

Setelah kemunculan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) pada tahun 2014, Kelompok Abu Sayyaf terpecah menjadi dua faksi. Faksi Basilan yang dipimpin oleh Isnilon Hapilon menyatakan kesetiaan mereka kepada ISIS. Sementara itu, Faksi Jolo tetap melakukan penculikan dan penyanderaan. Hal tersebut kemudian memberikan masalah baru bagi pemerintah Filipina, dimana selain tetap harus menangani berbagai kasus penculikan dan penyanderaan, mereka juga harus menghadapi serangkaian aksi teror seiring dengan kemunculan ISIS di Filipina (ipac, 2016). Namun terlepas dari perpecahan di tubuh internal

yang terjadi, Kelompok Abu Sayyaf tetap konsisten melakukan penculikan untuk mendapatkan uang tebusan.

Kasus dan konflik kelompok separatis Abu Sayyaf tersebut merupakan konflik yang terjadi di salah satu negara yang berada pada rezim kerjasama antara Indonesia dan Filipina ini. Konflik tersebut belum berakhir hingga mengakibatkan masih terus lahirnya para pembajak kapal di sekitar perairan Laut Sulu karena selain berbagai tuntutan yang tidak berhasil mereka dapatkan, kelompok ini juga semakin tertekan dengan situasi yang ada, dimana mengharuskan mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi kelompok tersebut. Meskipun Filipina menyepakati kerjasama peningkatan keamanan dan pertahanan dalam upaya mengatasi para pembajak di Laut Sulu, namun belum berhasilnya mereka menghentikan gerakan gerilya dari kelompok separatis Abu Sayyaf di bagian selatan negara mereka mengindikasikan bahwa belum adanya kesadaran jika ingin menghentikan aksi pemabajakan kapal di Laut Sulu, maka gerakan kelompok ini di negara mereka harus dihentikan terlebih dahulu agar tidak terus melahirkan kelompok dan jaringan baru yang pada akhirnya akan menambah jumlah para pembajak kapal di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina ini.

2.1.2 Asymmetry

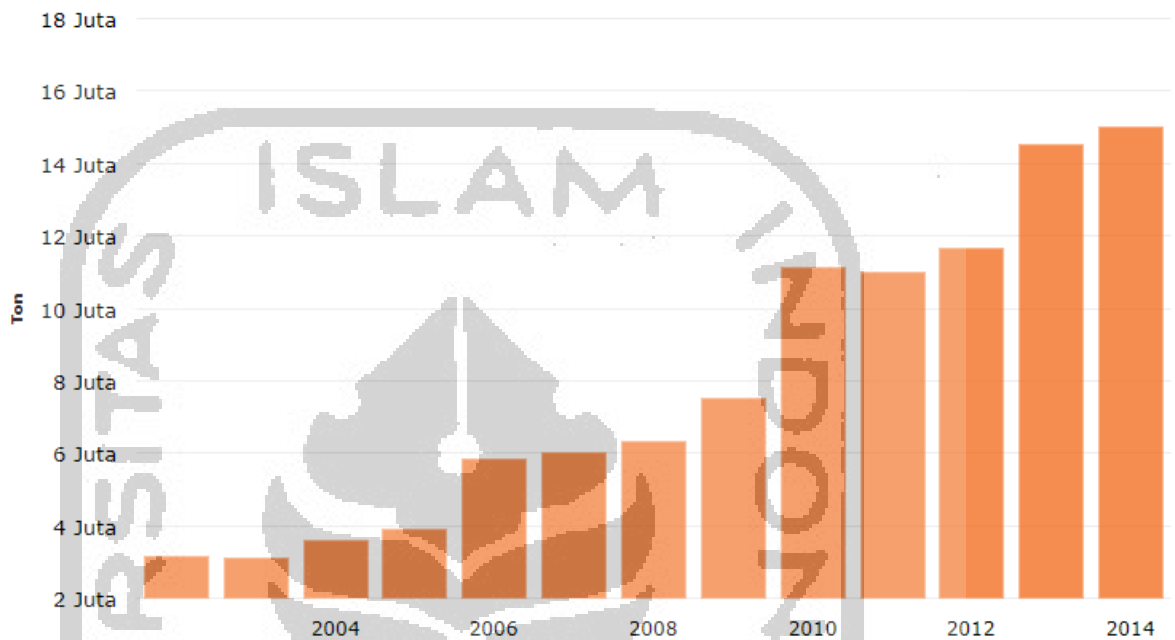
Asymmetry bisa diartikan sebagai hubungan yang tidak seimbang bahkan bisa bersifat negatif antara aktor anggota sebuah rezim yang dikarenakan oleh kepentingan nasional yang berbeda-beda. Adanya permasalahan Incongruity sangat berkaitan dengan permasalahan Asymmetry yang terjadi. Nantinya hal tersebut bisa semakin memperkecil kemungkinan-kemungkinan aktor anggota

sebuah rezim melakukan kerjasama secara suka rela untuk mewujudkan tujuan dari rezim kerjasama tersebut (Underdal, 2002, pp. 3-45). Intinya, permasalahan Asymmetry dilihat dari kepentingan nasional masing-masing negara anggota rezim yang berbeda satu sama lainnya. Masing-masing negara akan melakukan tindakan atau mengeluarkan kebijakan yang menurut mereka bisa melindungi kedaulatan negara atau bisa mencapai kepentingan nasionalnya. Tindakan suatu negara atau kebijakan yang dikeluarkannya hanya akan menguntungkan negara itu saja walaupun nantinya akan mengakibatkan kerugian bagi negara lain di dalam rezim tersebut. Hal ini lah yang mengakibatkan munculnya permasalahan Asymmetry dalam suatu rezim internasional.

Kebijakan Moratorium Ekspor Batubara Indonesia ke Filipina

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman batu bara dari sejumlah daerah Kalimantan ke Filipina. Sikap tegas itu dilakukan sampai ada jaminan dari Pemerintah Filipina terhadap keamanan kapal-kapal yang mengangkut batu bara dari Indonesia ke Filipina. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh maraknya aksi pembajakan kapal dan juga penculikan kru serta penumpang kapal yang melintasi wilayah perairan Laut Sulu yang menjadi perbatasan antara Indonesia dan juga Filipina. Hal tersebut juga karena pemerintah Indonesia menganggap bahwa berbagai aksi yang dilakukan oleh kelompok perompak di Laut Sulu diakibatkan karena kebutuhan ekonomi mereka yang semakin lama semakin tidak dapat terpenuhi karena salah satu kapal yang mereka bajak yakni kapal Charles 001 mengangkut batu bara yang tentunya bernilai jual tinggi.

Kebijakan penghentian ekspor batubara ini tentu sangat merugikan Filipina karena 96% pembangkit listrik di Filipina menggunakan suplai batubara dari Indonesia (Gumilang, 2016)



(Sumber :Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2015)

Sikap dari pemerintah Indonesia yang beranggapan bahwa dengan melakukan kebijakan ini dapat mengamankan kedaulatan negara dan keamanan warga negara memperlihatkan tindakan yang masih mengedepankan kepentingan nasional negara Indonesia terlebih dahulu. Hal tersebut tentu dapat menyulitkan jalannya berbagai kesepakatan kerjasama antara Indonesia dan Filipina dikarenakan terdapat salah satu pihak yang masih mengedepankan kepentingan nasionalnya yang sekaligus dikhawatirkan akan memperkecil upaya kerjasama secara suka rela antar kedua belah pihak dalam rezim kerjasama ini.

2.1.3 Cumulative Cleavages

Cumulative Cleavages adalah sebuah keadaan dimana negara-negara yang menjadi anggota dalam suatu rezim tersebut akan terus berada di dalam situasi yang sama dalam setiap dimensi atau masalah di dalam rezim tersebut. Apabila ada satu negara yang kalah maka akan terus kalah, dan sebaliknya apabila negara tersebut menang akan selalu menjadi pemenang (Underdal, 2002, pp. 3-45). Cumulative Cleavages disini juga bisa dijelaskan saat adanya dominasi satu aktor. Dengan adanya dominasi aktor tersebut, akan mengakibatkan adanya aktor yang menang dan akan selalu menang, aktor yang kalah akan selalu kalah. Menang dan kalah disini saat aktor tersebut berhasil atau tidak dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Dalam permasalahan mengenai pencari suaka di Australia dan Indonesia, Cumulative Cleavages dalam rezim kerjasama Indonesia dan Filipina bisa dilihat saat negara anggota rezim yakni Filipina yang merupakan negara asal dari pembajak laut kelompok Abu Sayyaf, masih belum menyelesaikan konflik internal yang terjadi di negaranya. Sampai saat ini, masih terdapat banyak aksi kekerasan yang disebabkan oleh kelompok Abu Sayyaf terutama di bagian selatan negara Filipina yang pada akhirnya semakin banyak melahirkan pembajak-pembajak kapal di sekitar perairan Laut Sulu.

Konflik yang masih terjadi di negara Filipina yang merupakan negara anggota rezim kerjasama Indonesia dan Filipina menjadi sebuah Cumulative Cleavages atau sebuah perbedaan yang terakumulasi di dalam rezim tersebut. Perbedaan yang terakumulasi ini dikarenakan negara Filipina masih belum menyelesaikan konflik di negara mereka sehingga masih mengakibatkan

banyaknya gerakan gerilya dari kelompok separatis baik di daratan maupun di wilayah perairan. Sedangkan anggota lainnya, yaitu Indonesia dan terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan mengenai para perompak terutama gerakan terorisme dan kelompok separatis lainnya agar tidak semakin berkembang.

2.2. KAPASITAS PENYELESAIAN MASALAH

Apabila keputusan yang didapat secara kolektif menghasilkan satu solusi, maka kapasitas penyelesaian masalah dapat dipahami sebagai fungsi yang saling terkait yang terdiri dari tiga unsur yaitu Institutional Setting, Distribution Power, dan Skill and Energy (Underdal, 2002, p.17-21).

2.2.1 Institutional Setting

Institutional setting adalah seperangkat aturan atau suatu bentuk perilaku yang mempunyai fungsi mendefinisikan praktik sosial, menetapkan peran kepada peserta dalam praktik tersebut, dan juga membimbing interaksi diantara pihak-pihak yang mempunyai peran (Young, 1994). Jadi, Institutional setting dalam artian ini disebut juga sebuah aturan yang mengatur perilaku anggota rezim satu dengan yang lainnya.

Di dalam kerjasama Indonesia dan Filipina ini, tidak terdapat suatu mekanisme yang tegas mengenai pemberian sanksi kepada anggota apabila melanggar kesepakatan. Namun di rezim ini mengandalkan norma dan kesadaran masing-masing anggota rezim untuk mengimplementasikan komitmen mereka ketika sepakat untuk menyetujui kerjasama yang akan dilakukan kedepannya. Maka ketika kesepakatan kerjasama yang telah disetujui seperti patroli bersama, yukar menukar informasi, pembentukan hotline dan crisis center, penyusunan

SOP penanganan perompak dan pembebasan sandera, hingga latihan militer bersama akan lebih dibutuhkan kesadaran dari masing-masing negara untuk melaksanakannya karena tidak terdapatnya sanksi hukum yang tegas apabila melanggar.

2.2.2 Distribution of Power

Distribution of Power atau distribusi kekuasaan antar aktor yang terlibat didalam sebuah rezim internasional. Distribution of Power dalam suatu rezim bisa dilihat ketika ada salah satu atau lebih dari anggota rezim tersebut mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada anggota yang lainnya namun tidak menyalahgunakan kekuasaan tersebut, sebaliknya kekuasaan tersebut dimanfaatkan untuk menjadi pemimpin didalam rezim tersebut. Tidak hanya itu saja, Distribution of power juga bisa dilihat ketika ada pihak-pihak yang tidak mempunyai kekuasaan yang besar namun bisa mengontrol pihak yang mempunyai kekuasaan lebih besar.

Jika kita melihat pada rezim kerjasama antara Indonesia dan juga Filipina ini, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat negara yang memiliki power atau kekuatan yang lebih besar atau lebih kecil. Kekuatan kedua negara untuk saling mempengaruhi sama besarnya karena pada dasarnya, kerjasama ini dibuat bukan untuk saling mempengaruhi satu sama lain melainkan untuk saling bekerjasama mengatasi permasalahan yang ada, yakni permasalahan kelompok pembajak kapal di Laut Sulu. Power atau kekuatan untuk mempengaruhi yang dimiliki oleh kedua negara baru akan digunakan ketika berhadapan langsung dengan para pelaku pembajakan seperti contohnya ketika bernegosiasi dalam proses pembebasan

sandera yang ditahan oleh kelompok tersebut, bukan untuk mempengaruhi aktor atau pihak yang terlibat dalam rezim kerjasama ini.

2.2.3 Skill and Energy

Suatu rezim internasional membutuhkan skill and energy dalam menangani permasalahan yang menjadi fokus dalam rezim tersebut. Skill and energy merupakan unsur yang ketiga dalam kapasitas penyelesaian masalah di konsep efektivitas sebuah rezim. Pada bagian skill and energy ini, merupakan perpindahan analisa dari studi struktur ke studi perilaku. Apabila skill and energy semakin besar, maka efektivitas sebuah rezim juga akan semakin meningkat. Suatu permasalahan dapat diatasi secara efektif apabila ada sebuah sistem atau lembaga yang memiliki kekuatan dan didukung juga oleh faktor lain yaitu adanya sebuah skill and energy yang memadai. Pada bagian Skill and energy ini terbagi menjadi dua jenis yaitu instrumental leadership dan epistemic community (Underdal, 2002).

Instrumental Leadership

Instrumental leadership atau kepemimpinan instrumental bisa dijelaskan sebagai sebuah kecenderungan untuk memfasilitasi pembentukan dan implementasi dari sebuah rezim tersebut. Instrumental leadership akan semakin dibutuhkan apabila masalah yang ada semakin besar. Namun, apabila masalah semakin besar, akan menuntut instrumental leadership yang semakin besar juga dan hal tersebut akan sulit untuk dilakukan. Maka dari itu, instrumental leadership akan cenderung membuat perbedaan yang besar dalam menangani masalah yang cukup mengancam (Underdal, 2002). Pengaruh dari rezim kerjasama Indonesia dan Filipina yang menangani masalah pembbajakan kapal di wilayah perbatasan

kedua negara dapat dilihat dari bagaimana anggota rezim mengimplementasikan kerangka kerja dari rezim ini. Dengan melihat gencarnya kerjasama yang semakin diperkuat oleh kedua negara, maka akan semakin membantu peraturan dalam negeri masing-masing negara agar peraturan tersebut semakin diperkuat. Dengan kata lain, semakin kuatnya kerjasama yang dilakukan dalam rezim ini, akan semakin mempengaruhi implementasi dari peraturan-perturan dalam negeri yang terkait dengan masalah pembajakan kapal tersebut.

Epistemic Community

Pengertian epistemic community sendiri adalah sebuah perkumpulan atau jaringan profesional yang terdiri atas kumpulan negara-negara, organisasi yang mempunyai keahlian dan kompetensi yang telah diakui dalam suatu bidang tertentu (Haas, 1992). Jaringan organisasi transnasional yang bersifat informal dari sebuah epistemic community mempunyai kontribusi dalam efektivitas rezim internasional. Hal ini dikarenakan jaringan organisasi informal tersebut memperkuat pengetahuan dimana sebuah rezim dapat dibentuk dan menjalankan tugasnya hingga mencapai tujuan. Semakin terintegrasi sebuah epistemic community, dan semakin dalam pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan nasional yang relevan maka akan semakin efektif rezim tersebut (Underdal, 2002).

Dalam rezim kerjasama Indonesia dan Filipina ini, memiliki bantuan dari International Maritime Bureau (IMB) yang mana mereka menyediakan data angka jumlah kejadian pembajakan di beberapa wilayah perairan termasuk perairan Lau Sulu. Selain itu data angka kejadian dan jumlah korban hingga modus penyerangan yang dilakukan oleh kelompok bajak laut ini dapat melihat data yang

dimiliki oleh Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP). Dengan bantuan-bantuan seperti ini tentu akan memudahkan Indonesia dan Filipina dalam mencapai tujuan dari kerjasama ini, karena data dan angka seperti itu sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi kedua negara dalam menjalankan proses kerjasama yang dibentuk.



BAB III

EFEKTIVITAS KERJASAMA INDONESIA DENGAN FILIPINA MENGHADAPI PEMBAJAKAN KAPAL

Dalam hubungan internasional, kerjasama internasional menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh setiap negara untuk menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam suatu kerjasama internasional terdapat berbagai macam kepentingan nasional dari masing-masing negara yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri sendiri.

Menurut K.J.Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus, pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya, persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan (Holsti, 1988). Selain itu juga, kerjasama internasional saat ini sangatlah penting karena walaupun negara-negara sudah merdeka dan memiliki kedaulatan, mereka tidak boleh saling terasing dan terpisah melainkan harus saling berdekatan dan berhubungan (Robert Jackson & Georg Sorensen, 2014).

Dalam penelitian ini, kerjasama dari Indonesia dengan Filipina haruslah terjalin karena selain kedua negara merupakan negara yang berdekatan secara geografis, Indonesia dan Filipina juga memiliki beberapa kepentingan yang sama

seperti ekonomi, pertahanan, serta keamanan. Untuk memenuhi kepentingan tersebut, Indonesia dan Filipina tentu harus bekerjasama agar dapat dengan lebih mudah dalam memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut.

3.1. Efektivitas Kerjasama Indonesia dengan Filipina Tahun 2016-2018

Berbagai kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan juga Filipina dalam meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan di wilayah perairan Sulu dan perairan Sulawesi telah banyak dilakukan. Tidak hanya dilakukan oleh kepala negara yang bersepakat mengenai hal tersebut, keseriusan dalam menekan angka pembajakan kapal juga didukung dengan aktifnya peran kementerian hingga lembaga pemerintahan nonkementerian seperti BNPT. Namun tentu dengan banyaknya upaya kerjasama menghadapi permasalahan pembajakan kapal yang diinisiasi oleh kedua negara, apakah semakin mengurangi angka terjadinya aksi pembajakan di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina? Hal tersebut yang tentunya menjadi pertanyaan banyak pihak melihat semakin gencarnya kerjasama dan fokus pemerintah kedua negara dalam upaya menangani permasalahan tersebut.

Kerjasama yang efektif dan dapat menuntaskan permasalahan merupakan kerjasama yang diharapkan oleh semua pihak. Namun suatu permasalahan memiliki tingkat kesulitan tersendiri untuk dapat diselesaikan. Menurut Arild Underdal, tingkat kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama karena karakteristik permasalahan itu sendiri yang mana terdapat permasalahan yang lebih rumit ataupun juga lebih mudah untuk ditangani. Hal tersebut karena dapat dikatakan secara politik lebih ramah dan

secara proses tidak begitu rumit untuk diselesaikan. Namun penyebab lain juga dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan memiliki kemampuan yang cukup baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu juga, institusi yang menangani permasalahan tersebut memiliki power yang lebih kuat dalam menangani permasalahan yang dihadapi (Underdal, 2001, hal. 1-2). Dalam permasalahan penelitian ini, berbagai kerjasama yang telah dilakukan akan dilihat efektivitasnya terhadap kasus yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina tepatnya di wilayah perairan Sulu-Sulawesi ini. Pengukuran efektivitas dalam penelitian ini akan melihat apakah kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan juga Filipina pada tahun 2016 hingga tahun 2018 tersebut dapat menekan angka pembajakan di wilayah perairan Sulu yang menjadi perbatasan kedua negara.

Tingginya angka kejadian pembajakan di wilayah perairan Sulu dimulai pada tahun 2016 dan perbincangan pun mulai ramai ketika terdapat kapal Indonesia yang menjadi korban pembajakan kapal di wilayah perairan Sulu. Pemberitaan yang ramai tidak terlepas dari jatuhnya beberapa korban jiwa dalam kejadian pembajakan tersebut. Munculnya aksi pembajakan tersebut dikarenakan oleh kelompok separatis Abu Sayyaf yang mendiami wilayah Filipina bagian Selatan mulai kehilangan arah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga berbagai aksi pembajakan kapal tersebut adalah dampak dari kesulitan mereka dalam memenuhi kehidupan ekonomi yang pada akhirnya melakukan tindakan pembajakan dengan harapan dapat meraih keuntungan yang besar.

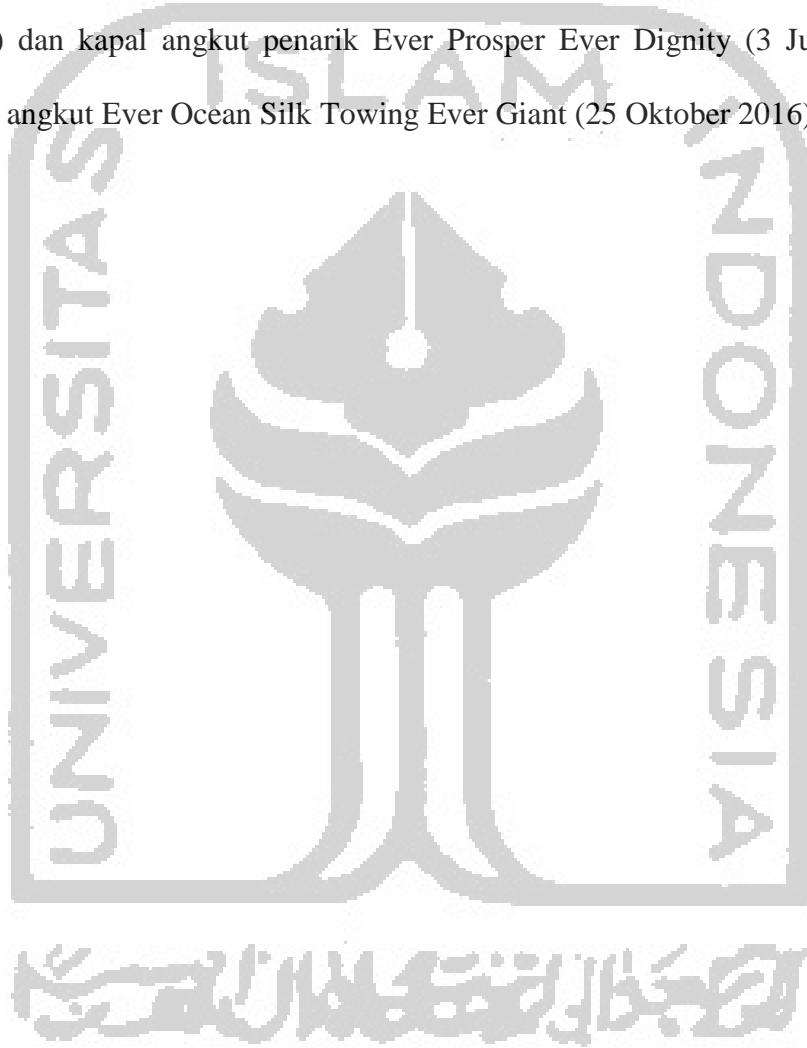
Gambar 3.1 Lokasi Pembajakan Kapal 2016



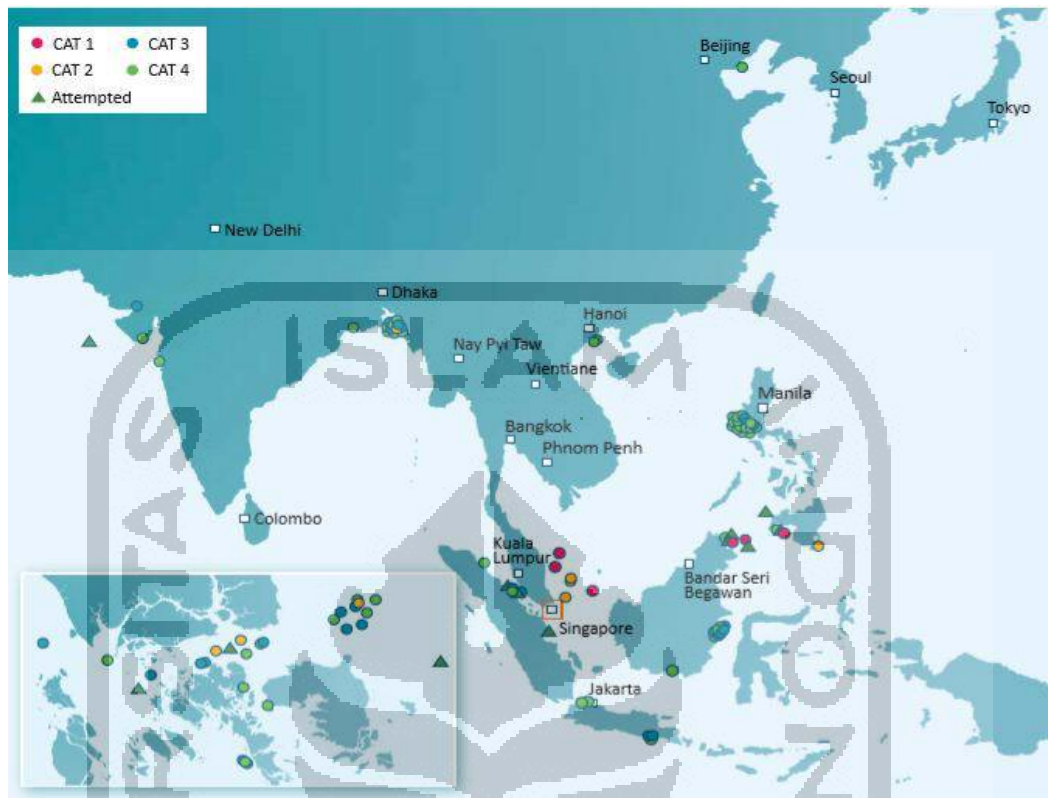
(Sumber: ReCAAP Annual Report 2016)

Gambar tersebut menunjukkan lokasi kejadian pembajakan kapal yang terjadi di sebagian wilayah benua Asia. Pada gambar tersebut juga memperlihatkan tingkat aksi pembajakan yang banyak terjadi di sekitar Kawasan Filipina bagian selatan atau tepatnya di wilayah perairan Sulu. Terdapat 13 kejadian yang mana sepuluh dari 13 insiden yang dilaporkan pada tahun 2016 melibatkan penculikan kru dari kapal angkut, yaitu Brahma 12 (26 Maret 2016), Massive 6 (1 April 2016), Henry (15 April 2016), Charles 00 (22 Juni 2016) dan Serudong 3 (18 Juli 2016); kapal kargo umum Dong Bang Giant No. 2 (20

Oktober 2016); kapal curah Royal 16 (11 November 2016) dan kapal penangkap ikan dan pukat (9 Juli 2016, 10 September 2016 dan 20 Desember 2016) di Laut Sulu dan perairan lepas Sabah bagian timur. Insiden ini terjadi sejak Maret 2016 dengan setidaknya satu insiden per bulan kecuali Mei 2016 dan Agustus 2016. Tiga insiden lainnya melibatkan pembajakan produk tanker, Hai Soon 12 (7 Mei 2016) dan kapal angkut penarik Ever Prosper Ever Dignity (3 Juni 2016) dan kapal angkut Ever Ocean Silk Towing Ever Giant (25 Oktober 2016).



Gambar 3.1 Lokasi Pembajakan Kapal 2017



(Sumber: ReCAAP Annual Report 2017)

SEAS	2016	2017
South Chine Sea	5	12
Singapore		
Malacca Straits	2	9
Sulu-Celebes Sea	12	3
Vietnam	9	2

(Sumber: ReCAAP Annual Report 2017)

Memasuki tahun 2017, aksi pembajakan di wilayah perairan Sulu mengalami penurunan drastis karena hanya terjadi tiga aksi pembajakan kapal yang mana penurunan ini diperkirakan terjadi karena negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan Sulu seperti Indonesia dan juga Filipina semakin gencar melakukan pengamanan di wilayah tersebut. Selain Indonesia dan juga Filipina, negara Malaysia juga turut serta membantu melakukan pengamanan di wilayah perairan Sulu hingga wilayah perairan Sabah bagian timur sehingga kekuatan kerjasama negara-negara di sekitar perairan tersebut semakin kuat dan lengkap.

Gambar 3.1 Lokasi Pembajakan Kapal 2018



(Sumber : ReCAAP Annual Report 2018)

SEAS	2016	2017	2018
South Chine Sea	5	12	3
Singapore			
Malacca Straits	2	9	6
Sulu-Celebes Sea	12	3	2
Vietnam	9	2	4

(Sumber : ReCAAP Annual Report 2018)

Pada tahun 2018, angka pembajakan kapal di wilayah perairan Sulu semakin berkurang dari tahun sebelumnya dengan jumlah kejadian sebanyak dua kejadian pembajakan kapal. Kejadian tersebut menimpa kapal nelayan Sri Dewi 1 pada tanggal 11 September 2018 ketika berlayar di perairan Sabah bagian timur dan anggota kru kapal tersebut dibawa menuju wilayah Sulu di Filipina bagian selatan. Kemudian kejadian kedua terjadi pada tanggal 5 Desember 2018 yang menimpa dua orang Indonesia dan satu orang Malaysia di sekitar perairan Pulau Laminusa sebelum dibawa ke daratan So Dumlog di provinsi Sulu pada tanggal 7 Desember 2018.

Penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori efektivitas rezim yang dikemukakan oleh Arild Underdal. Menurut Arild Underdald, rezim merupakan seperangkat aturan dan norma yang dirancang untuk mengatur sebuah kegiatan atau isu tertentu (Underdal, 2001, hal. 1). Dalam melihat efektivitas suatu rezim yang dalam hal ini adalah kerjasama antara Indonesia dan Filipina, terdapat berbagai upaya dalam menciptakan kerjasama tersebut sekaligus juga untuk

mengimplementasikannya serta menilai apakah kerjasama tersebut berhasil dan efektif atau bahkan tidak berhasil dan tidak efektif.

Jika kita melihat dan mengacu pada data dan angka-angka jumlah kejadian pembajakan di wilayah perairan Sulu tersebut, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina mulai dari melakukan upaya pengamanan serta patrolii Bersama hingga upaya pembebasan sandera cukup berhasil. Namun sebelum itu, kita harus melihat bagaimana kerjasama Indonesia dan Filipina ini berada dalam level atau skala kolaborasi dalam teori efektivitas rezim. Skala kolaborasi ini digunakan untuk melihat sejauh mana kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan juga Filipina yang pada akhirnya nanti dapat dilihat tingkat efektivitas kerjasama tersebut. Skala kolaborasi tersebut terdiri atas enam level, yakni :

0. Gagasan bersama tanpa suatu koordinasi tindakan bersama
1. Koordinasi tindakan secara diam-diam
2. Koordinasi tindakan dengan dasar aturan atau standar yang dirumuskan secara eksplisit, namun implementasi berada sepenuhnya di tangan pemerintah sebuah negara. Tidak ada penilaian terpusat mengenai efektivitas dari sebuah tindakan.
3. Koordinasi tindakan dengan dasar aturan atau standar yang dirumuskan secara eksplisit, namun implementasi berada sepenuhnya di tangan pemerintah sebuah negara. Terdapat penilaian terpusat akan efektivitas dari sebuah tindakan.
4. Koordinasi yang terencana, dikombinasikan dengan implementasi pada level nasional. Didalamnya terdapat penilaian terpusat akan efektivitas sebuah tindakan.

5. Koordinasi dengan perencanaan dan implementasi yang menyeluruh terintegrasi, dengan penilaian terpusat akan efektifitas

Untuk dapat menentukan skala kolaborasi tersebut, penulis menganalisisnya dengan mengambil tiga poin utama yang terdapat dalam skala kolaborasi tersebut untuk kemudian dilihat sudah sejauh mana ketiga poin tersebut di dalam kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina. Ketiga poin tersebut adalah *Output*, *Outcome*, dan *Impact*. Skala atau level kolaborasi ini juga dipengaruhi kuat oleh independnet variable yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

3.1.1. Koordniasi Terintegrasi (Output)

Output yang dimaksud disini adalah keluaran yang muncul dari proses pembentukan kerjasama dalam menangani permasalahan pembajakan kapal antara Indonesia dan Filipina. *Output* ini dapat berbentuk tertulis ataupun Output ini juga dapat berbentuk tidak tertulis seperti kesepakatan-kesepakatan antara kepala negara Indonesia dan Filipina ataupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Disini kita dapat melihat *output* sebagai sebuah langkah awal dalam upaya menghadapi suatu permasalahan, dalam kata lain sebagai bentuk koordinasi antar pihak-pihak yang bekerjasama. Koordinasi pertama yang dilakukan oleh kedua negara adalah dengan keseriusan akan upaya penanganan permasalahan pembajakan kapal yang terlihat ketika pada tahun 2016, tepatnya pada bulan September atau hanya berselang tiga bulan dari pelantikan preseiden Rodrigo Duterte, dirinya langsung terbang menuju ibukota Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Isatana Negara (Parameswaran, 2016).

Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan karena beberapa bulan sebelumnya terdapat aksi pembajakan yang disinyalir dilakukan oleh kelompok ekstrimis yang mendiami wilayah selatan Filipina yakni kelompok Abu Sayyaf. Hal tersebut membuat Indonesia dan Filipina saat ini memiliki fokus pertahanan dan keamanan yang sama-sama diarahkan ke wilayah perbatasan kedua negara tepatnya di wilayah perairan Sulu hingga perairan Sulawesi. Duterte yang datang membawa inisiatif peningkatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan tidak lupa menyampaikan permintaan maafnya kepada pemerintahan Indonesia atas kejadian yang dialami kapal Indonesia di wilayah perairan Filipina (Parlina, 2016). Kesepakatan tersebut tentu merupakan bentuk *output* atau koordinasi yang tidak tertulis yang nantinya akan dan juga harus memiliki tindak lanjut dari kesepakatan tersebut.

Menindak lanjuti pertemuan tersebut, Indonesia dan juga Filipina memiliki kesepakatan yang ditandatangani dalam bentuk *joint declaration* yang juga ditandatangani oleh negara Malaysia yang sama-sama memiliki permasalahan terkait dengan pembajakan kapal terutama di kawasan selat Malaka. Dalam kesepakatan tersebut, ketiga negara menyetujui tindakan patroli bersama, tindakan dalam menghadapi penyanderaan, dan tukar-menukar informasi. Kesepakatan ini merupakan bentuk *output* dan koordinasi secara tertulis dalam bentuk *joint declaration* serta merupakan koordinasi terencana dengan memiliki poin-poin penting yang dituangkan sebagai bentuk kerjasama kedua negara tersebut.

Bentuk lain dari koordinasi tertulis yang dilakukan oleh kedua negara adalah penandatanganan MoU yang dilakukan oleh BNPT sebagai bentuk dukungan dan juga peran aktif yang harus ditunjukkan oleh pihak-pihak lainnya meskipun

bukan berasal dari lingkup kementerian ataupun Presiden saja. Lembaga negara nonkementerian seperti BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) juga ikut menjadi pihak yang membantu pemerintah Indonesia dalam upayanya meningkatkan kerjasama pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dengan negara Filipina. BNPT dan pemerintah Filipina yang diwakili oleh Departemen Luar Negeri menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU pada tanggal 10 Agustus 2017.

Melihat berbagai upaya koordinasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dapat dilihat bahwa Indonesia dan Filipina sangat serius untuk dapat menangani permasalahan pembajakan kapal yang sangat mengganggu ini. Koordinasi terencana yang dilakukan kedua negara menjadi poin penting dalam menilai sejauh mana tingkat koordinasi atau kerjasama kedua negara dalam memulai langkah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

3.1.2. Implementasi Menyeluruh (Outcome)

Outcome berhubungan dengan adanya tindakan atau perubahan perilaku oleh masing-masing negara yang bekerjasama dalam hal ini adalah Indonesia dan Filipina. *Outcome* dari rezim atau kerjasama yang dibentuk oleh Indonesia dan Filipina ini dapat dikatakan berjalan dengan baik karena terdapat tindakan nyata atau implementasi di kedua negara dalam menyikapi kerjasama yang dijalankan.

Hal tersebut terlihat dari banyaknya upaya implementasi yang dilakukan oleh kedua negara yang tentu dalam skala internasional untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Perubahan perilaku yang dimaksud disini adalah ketika terdapat komitmen yang kuat dalam menyelesaikan suatu permasalahan bersama, kedua negara juga akan bersama-sama untuk dapat menyelesaikan permasalahan

tersebut dengan cara mengimplementasikan berbagai cara yang telah disepakati dalam koordinasi yang sudah direncanakan sebelumnya.

Implementasi pertama terlihat pada tahun 2016 ketika Indonesia dan Filipina serta Malaysia yang menandatangani *joint declaration* mengenai penanganan permasalahan pembajakan kapal. Pada tahun 2016 tersebut dimulai dengan patroli bersama yang dilakukan oleh negara Indonesia, Filipina, serta Malaysia yang mana patroli tersebut dilakukan dengan tujuan mengamankan wilayah perairan dari berbagai ancaman yang terdapat disana terutama ancaman dari para perompak kapal. Selain itu juga pada tahun yang sama, ketiga negara terutama Indonesia dan Filipina mulai saling terbuka dalam memberikan informasi terkait dengan pembajakan kapal di kawasan perbatasan kedua negara tersebut serta membuka *hotline* dan *crisis center* serta penyusunan *Standard Operational Procedure* (SOP).

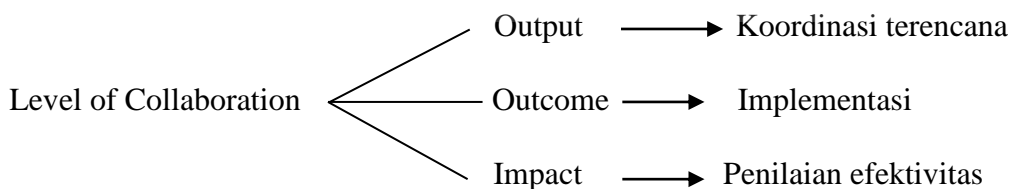
Kemudian pada tahun 2017, BNPT yang sebelumnya menandatangani MoU dengan Departemen Luar Negeri Filipina, mulai mengimplemntasikan kesepakatan tersebut. Bersama dengan Kementerian Pertahanan, pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Filipina mulai melakukan latihan militer bersama-sama. Latihan gabungan tersebut merupakan upaya untuk mempersempit ruang gerak terorisme dan kelompok ekstrimis yang merupakan pelaku pembajakan kapal yang selama ini beroperasi di perairan Sulu yang menjadi perbatasan kedua negara.

Berbagai upaya dan implementasi dari kerjasama yang diusung oleh Indonesia dan juga Filipina tersebut memperlihatkan adanya kepentingan yang sama dari kedua negara yang berasal dari komitmen bersama sebagai pihak yang

memiliki permasalahan serupa. Implementasi tersebut juga dilakukan secara menyeluruh dalam artian tidak hanya terfokus atau dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan kedua belah pihak memiliki peran penting dan juga bergerak dengan melakukan aksi nyata.

3.1.3. Penilaian Hasil (Impact)

Kemudian terdapat *impact* yang berhubungan dengan terciptanya situasi tertentu yang ingin dicapai dengan terbentuknya suatu rezim atau kerjasama. Dalam permasalahan pembajakan kapal antara Indonesia dan Filipina ini tentu situasi yang ingin diciptakan adalah situasi kondusif dan aman di sekitar perbatasan kedua negara yakni di sekitar perairan Sulu. Jika melihat situasi yang ingin dicapai tersebut, situasi kondusif dan aman sudah dapat dipenuhi namun masih harus dalam pengawasan dan penjagaan yang serius. Hal tersebut karena jika kita melihat pada jumlah kejadian pembajakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang memang terus berkurang, namun belum dapat dihilangkan secara menyeluruh karena memang wilayah operasi para pelaku pembajakan ini cukup luas dan memiliki siasat atau modus operandi yang baru.



Tabel 3.1.3 Jumlah Pembajakan Kapal Tahun 2016-2018 Laut Sulu

Incident Type	2016	2017	2018	Total
Actual	12 incidents -5 tugboat -5 fishing boat -1 cargo ship -1 bulk carrier	3 incidents -1 tugboar -1 fishing boat -1 bulk carrier	2 incidents -2 fishing boat	17 incidents
Attempted	6 incidents -5 bulk carrier -1 product tanker	4 incidents -1 container ship -1 bulk carrier -1 cargo ship -1 passenger & cargo ferry	1 incidents -1 container ship	11 incidents

(Sumber: ReCAAP Annual Report 2018)

Berdasarkan pengukuran terhadap *output*, *outcome*, dan *impact* di atas, dapat dikatakan bahwa proses implementasi dari kerjasama yang dibentuk oleh Indonesia dan Filipina dalam menghadapi masalah pembajakan ini memang cukup baik dan dapat dikatakan efektif. Namun berdasarkan analisis kerumitan

masalah terkait kerjasama peningkatan keamanan dan pertahanan menghadapi pembajakan kapal, dapat dikatakan bahwa tingkat kolaborasi anggota rezim kerjasama ini berada di level rendah yaitu level 2. Adapun level kolaborasi tingkat 2 yaitu, Adanya koordinasi tindakan berdasarkan aturan atau standar yang dirumuskan secara eksplisit tetapi dengan implementasi sepenuhnya di tangan pemerintah nasional. Tidak ada penilaian terpusat akan efektivitas tindakan yang dilakukan.

Rezim Kerjasama Indonesia dan Filipina juga dikatakan tidak efektif karena didalam mekanisme yang dijalankan oleh anggota rezim tidak menunjukkan behavioral change atau perubahan perilaku dari aktor anggota. Hal ini dibuktikan dengan masih ada negara anggota yang tidak menunjukkan adanya perubahan perilaku seperti negara Filipina yang masih tetap terjadi konflik di dalam negeri yang menjadi penyebab terus lahir dan berkembangnya kelompok-kelompok separatis dan para pembajak kapal. Tidak adanya tactical optimum atau teknik penyelesaian masalah paling optimal dalam rezim kerjasama ini, sehingga kerumitan masalah masih lebih besar daripada kapasitas penyelesaian masalahnya.

Great

Small

Penting tapi masih belum sempurna	Penting dan (hampir) sempurna	<i>High</i>
Tidak signifikan dan suboptimal	Tidak penting namun (hampir) sempurna	<i>Low</i>

Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa rezim kerjasama yang dijalankan oleh Indonesia dan Filipina dalam mencapai tujuannya berada pada dimensi yang “*High-Great*”. Artinya disini tujuan terciptanya rezim ini berada pada dimensi yang memiliki nilai penting tinggi namun masih memiliki jarak yang cukup lebar untuk menuju tujuan atau visi yang hendak dicapai karena permasalahan ini belum dapat dihilangkan sepenuhnya, baik itu permasalahan pada negara anggota dan juga angka kejadian pembajakan kapal yang belum dapat diatasi sepenuhnya

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Melalui uraian pembahasan bab-bab diatas, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini berbicara tentang bagaimana efektivitas kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan juga Filipina pada tahun 2016-2018 dalam menghadapi permasalahan pembajakan kapal di wilayah perbatasan atau lebih tepatnya di perairan Sulu. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kerjasama yang telah dilakukan oleh kedua negara pada rentang waktu tersebut yang sekaligus juga dapat menjawab rumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menghadapi isu pembajakan kapal di wilayah perbatasan pada tahun 2016-2018 ?

Berbagai kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan juga Filipina tentu bukan tanpa alasan. Kedua negara sepakat untuk bekerjasama guna meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan keduanya terutama untuk keamanan dan pertahanan di sekitar wilayah perairan yang menjadi perbatasan kedua negara. Hal tersebut dilakukan karena mulai banyaknya permasalahan yang hadir di wilayah tersebut mulai dari penyelundupan manusia, narkoba, illegal fishing hingga yang paling menarik perhatian adalah permasalahan pembajakan kapal yang melintas di perairan tersebut.

Permasalahan pembajakan kapal ini sangat menarik perhatian bukan hanya media dan masyarakat saja, melainkan juga tentunya pemerintah dan kepala negara Indonesia dan juga Filipina karena bukan hanya melakukan pembajakan

kapal saja, namun para pelaku juga tidak segan untuk melakukan pembunuhan terhadap awak kapal yang menjadi korban pembajakan. Melihat hal tersebutlah, Filipina melalui kepala negara yang baru saja dilantik yakni Rodrigo Duterte mulai melakukan pembicaraan serius dengan pemerintah negara Indonesia. Inisiatif tersebut disambut baik oleh Indonesia karena merasa bahwa permasalahan ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah negara Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan NKRI. Lebih dari itu, jatuhnya korban jiwa yang merupakan warga negara Indonesia juga menjadi latar belakang terjalannya kerjasama ini karena dianggap bahwa permasalahan ini telah mengganggu keamanan warga negara Indonesia dan juga Filipina. Mulai dari saat itulah kedua pemerintahan baik itu Indonesia dan Filipina sepakat untuk bersama-sama melakukan tindakan menghadapi permasalahan pembajakan kapal tersebut. Melalui kerjasama yang dijalin, diharapkan dapat membawa dampak yang signifikan bukan hanya untuk kedaulatan kedua negara saja, tetapi juga agar dunia internasional tidak memiliki pandangan atau citra yang buruk terhadap kedua negara ini apalagi sektor perairan menjadi hal yang cukup penting baik dari segi perdagangan dan juga mobilitas industri lainnya.

Untuk mencapai hal tersebut, tentu membutuhkan kerjasama dan pemahaman yang baik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini adalah pihak pemerintah Indonesia dan juga pihak pemerintah Filipina. Selain itu juga diperlukan kekuatan pertahanan dan keamanan yang baik pula karena permasalahan yang dihadapi sangat erat kaitannya dengan kekuatan pertahanan dan keamanan dari masing-masing pihak.

Penelitian ini akan melihat bagaimana berbagai kerjasama yang telah dijalin antara Indonesia dan Filipina tersebut berjalan dan bagaimana hasilnya apakah sudah efektif atau belum dan berhasilkah tujuan dan visi yang hendak dicapai oleh masing-masing pihak tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Rezim yang dikemukakan oleh Arild Underdal untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas rezim kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dan Filipina dalam menghadapi permasalahan pembajakan kapal di wilayah perbatasan kedua negara, atau lebih tepatnya di Kawasan perairan Sulu.

Untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas rezim kerjasama tersebut, peneliti melakukan analisis dengan melihat bagaimana koordinasi dan implementasi kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara hingga menghasilkan beberapa data yang menunjukkan jumlah kejadian pembajakan kapal di Kawasan perairan Sulu dari tahun 2016-2018. Selain itu, peneliti juga menganalisis kerumitan masala pada rezim kerjasama ini. Koordinasi dan implementasi serta hasil yang didapatkan dari kerjasama tersebut dan juga analisis kerumitan masalah menyimpulkan bahwa rezim kerjasama Indonesia dan Filipina berada di level rendah yaitu level 2. Adapun level kolaborasi tingkat 2 yaitu, Adanya koordinasi tindakan berdasarkan aturan atau standar yang dirumuskan secara eksplisit tetapi dengan implementasi sepenuhnya di tangan pemerintah nasional. Tidak ada penilaian terpusat akan efektivitas tindakan yang dilakukan. Skala tersebut didapatkan dari analisis yang digunakan dalam teori Efektivitas Rezim yang melihat tingkat efektivitas suatu rezim dari tipe kerumitan masalah dan juga kapasitas penyelesaian masalah dalam rezim tersebut, yang mana pada kerjasama Indonesia dan Filipina ini menunjukkan efektivitas yang rendah karena kerumitan

masalah yang masih cukup tinggi dan masih banyak terjadi, juga kapasitas penyelesaian masalah yang tidak cukup kuat.

Rezim Kerjasama Indonesia dan Filipina juga dikatakan tidak efektif karena didalam mekanisme yang dijalankan oleh anggota rezim tidak menunjukkan behavioral change atau perubahan perilaku dari aktor anggota. Hal ini dibuktikan dengan masih ada negara anggota yang tidak menunjukkan adanya perubahan perilaku seperti negara Filipina yang masih tetap terjadi konflik di dalam negeri yang menjadi penyebab terus lahir dan berkembangnya kelompok-kelompok separatis dan para pembajak kapal. Tidak adanya technical optimum atau teknik penyelesaian masalah paling optimal dalam rezim kerjasama ini, sehingga kerumitan masalah masih lebih besar daripada kapasitas penyelesaian masalahnya.

4.2. Rekomendasi

Dalam penelitian ini tentu masih memiliki beberapa kekurangan baik itu topik atau pembahasan penelitian maupun juga terhadap substansi permasalahan yang terjadi. Kekurangan dalam penelitian ini tentu terdapat pada cakupan waktu yang hanya mengambil rentang waktu dari tahun 2016 sampai 2018. Hal tersebut tentu menjadi kekurangan karena diketahui permasalahan pembajakan kapal ini sudah terjadi sejak sebelum tahun 2016 di beberapa titik di Kawasan Asia Tenggara yang dapat menjadi asal mula berkembangnya kelompok bajak laut di sekitar perairan Sulu yang menjadi perbatasan negara Indonesia dan Filipina. Selain itu, secara substansial kerjasama kedua negara dalam menghadapi permasalahan pembajakan kapal ini harus mendapat perhatian lebih besar lagi

karena walaupun pada dasarnya berhasil menciptakan situasi yang kondusif bagi aktivitas pelayaran, namun angka pembajakan kapal di perairan Sulu masih belum dapat dihilangkan sepenuhnya. Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian kedua belah pihak karena dikhawatirkan kelompok bajak laut tersebut dapat kembali berkembang dengan kemampuan yang baru dan kekuatan yang baru pula di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Abrari, M. (2018, Oktober 10). Retrieved September 23, 2019, from mongabay.co.id: <https://www.mongabay.co.id/2018/10/10/bentang-laut-sulu-sulawesi-jantung-segitiga-karang-dunia/>
- Amling, A. (2009). *STABLE SEAS: SULU & CELEBES SEAS*. Maritime Institute of Malaysia. Retrieved September 10, 2019, from <http://www.mima.gov.my/images/2019/06/sulu-celebes-seas.pdf>
- Anonymous. (2006). Metodologi Penelitian. *Jurnal Akademik Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Ariani, S. (2018). *The Implementation of Trilateral Cooperation Arrangement between Indonesia, Malaysia, and the Philippines Increasing of Maritime Security Cooperation to Reduce Maritime Piracy at Sulu Sea*. Jakarta: Research Gate.
- Baskara, N. (2009). *Gerilyawan-gerilyawan militan Islam : dari Al-Qaeda, Hizbullah, hingga Hamas*. Yogyakarta: Narasi.
- Bateman, S. (2010). Maritime Capacity Building in The Asia-Pacific Region. *Australia Maritime Affairs*, 6.
- BBC. (2016, Oktober 31). Retrieved September 10, 2019, from [bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-37823426](https://www.bbc.com/indonesia/dunia-37823426)
- BBC. (2017, Februari 2). Retrieved September 24, 2019, from [bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38837392](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38837392)
- BNPT. (2017, Agustus 10). Retrieved Maret 04, 2019, from [www.bnpt.go.id: https://www.bnpt.go.id/indonesia-filipina-jalin-kerjasama-untuk-perangi-terorisme-dan-kejahatan-lintas-negara.html](https://www.bnpt.go.id/indonesia-filipina-jalin-kerjasama-untuk-perangi-terorisme-dan-kejahatan-lintas-negara.html)
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9, 27.
- Breitmeier, H. (2006). *Analyzing International Environmental Regimes*. London: The MIT Press.
- Cullinane, M. (2019, Maret 15). Dipetik Maret 18, 2019, dari [www.britannica.com: https://www.britannica.com/place/Philippines/The-Spanish-period](https://www.britannica.com/place/Philippines/The-Spanish-period)
- Dam, S. (2010). *Politik Kelautan*. Jakarta: Bumi Aksara.

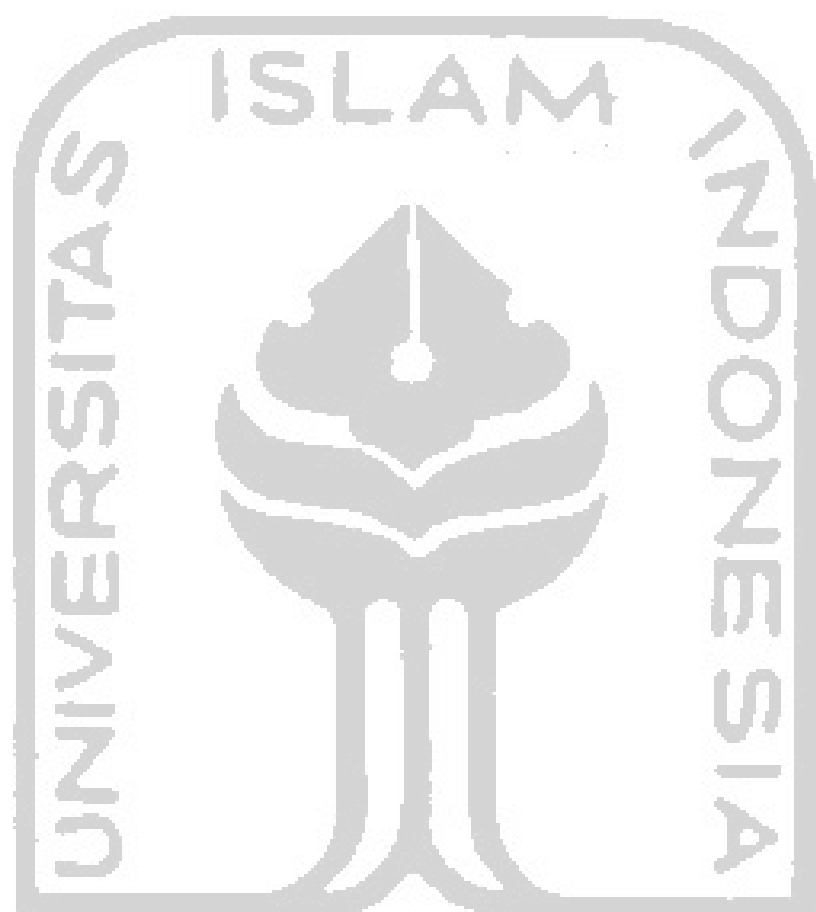
- Desker, B. (2005). *Protecting The Malacca Straits*. IDSS Commentaries. Retrieved September 11, 2019
- DFA. (2019, Agustus 1). Retrieved Oktober 18, 2019, from dfa.gov.ph: <https://dfa.gov.ph/dfa-news/dfa-releasesupdate/23966-treaty-setting-ph-indonesia-eez-boundary-enters-into-force>
- Djelantik, S. (2016). Sekuritisasi dan Kerjasama ASEAN dalam Meningkatkan Keamanan di Perairan Kawasan. *Jurnal Akademik Universitas Parahyangan*, 10, 4-5.
- Direktorat Informasi dan Media & Biro Administrasi Menteri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015). *Diplomasi Indonesia 2014*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Djelantik, S. (2016). Sekuritisasi dan Kerjasama ASEAN dalam Meningkatkan Keamanan di Perairan Kawasan. *Jurnal Akademik Universitas Parahyangan*, 10, 4-5.
- Encyclopedia. (2019, September 6). Retrieved September 26, 2019, from encyclopedia.com: <https://www.encyclopedia.com/places/asia/philippines-political-geography/philippines#ECONOMY>
- Espenilla, J. (2016, Mei 5). Retrieved September 10, 2019, from thediplomat.com: <https://thediplomat.com/2016/05/abductions-at-sea-a-3-way-security-challenge-for-indonesia-malaysia-and-the-philippines/>
- Febrianto, H. (2016, Juli 29). Retrieved September 24, 2019, from sindonews.com: <https://ekbis.sindonews.com/read/1127233/34/moratorium-batu-bara-ke-filipina-buat-industri-pelayaran-ri-lesu-1469779754>
- Febrica, S. (2014, Juni). Securing the Sulu-Sulawesi Seas from Maritime Terrorism: *Terrorism Research Initiative*, 8, 64-67.
- Gumilang, P. (2016, Juli 1). Retrieved September 24, 2019, from cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160701170123-20-142480/menhan-tegaskan-moratorium-batu-bara-ke-filipina-dilanjutkan>
- Guzman, S. S. (2013, September 30). Dipetik Maret 12, 2019, dari www.philstar.com: <https://www.philstar.com/opinion/2013/09/30/1239684/bangsamoro-story>

- Haas, P. (1992). Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination. *Internastional Organization*, 46, 1-35.
- Ho, J. (2006). The Security of Sea Lanes in Southeast Asia. *Asian Survey*, 46, 565-566.
- Holsti, K. J. (1988). *Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis Jilid II*. Jakarta: Erlangga.
- Interpol. (2003, September 20). Retrieved September 11, 2019, from [interpol.go.id: https://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/terorisisme/69-teroris-di-indonesia-dan-usaha-usaha-yang-diambil-untuk-mengalahkan-m](https://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/terorisisme/69-teroris-di-indonesia-dan-usaha-usaha-yang-diambil-untuk-mengalahkan-m)
- ipac. (2016). *PRO-ISIS GROUPS IN MINDANAO AND THEIR LINKS TO INDONESIA AND MALAYSIA*. Jakarta: Institute for Policy Analysis of Conflict.
- Jennings, R. (2018, Januari 09). Retrieved Maret 04, 2019, from [www.voaindonesia.com: https://www.voaindonesia.com/a/kerjasama-indonesia-filipina-tumpas-ancaman-isis-/4199188.html](https://www.voaindonesia.com/a/kerjasama-indonesia-filipina-tumpas-ancaman-isis-/4199188.html)
- KEMLU. (2019, Juni 23). Retrieved Juli 14, 2019, from [kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/read/389/berita/indonesia-dan-filipina-telah-selesaikan-ratifikasi-perjanjian-batas-zee](https://kemlu.go.id/portal/id/read/389/berita/indonesia-dan-filipina-telah-selesaikan-ratifikasi-perjanjian-batas-zee)
- Lapian, A. B. (2009). *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut, Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Liss, C. (2014). *Assessing Contemporary Maritime Piracy in Southeast Asia: Trends, Hotspots and Responses*. Frankfurt: Peace Research Institute Frankfurt.
- Mapping Militant Organizations: Abu Sayyaf Group. (2018). *Stanford University*, 2.
- Mitchell, R. B. (2007). Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law. Dalam R. B. Mitchell. Oxford: Oxford University Press.
- Møller, B. (2009). *PIRACY, MARITIME TERRORISM AND NAVAL STRATEGY*. Copenhagen: DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES. Retrieved September 2011, 2019
- News, G. (2007, Agustus 23). Retrieved September 10, 2019, from gmanetwork.com:

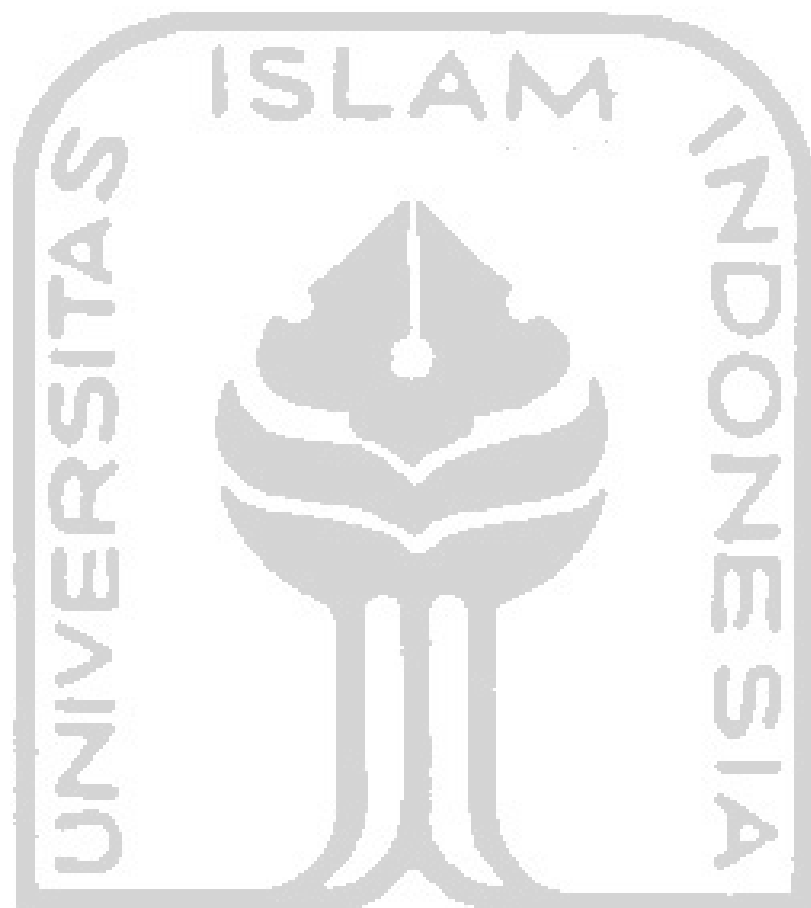
<https://www.gmanetwork.com/news/news/content/154797/abu-sayyaf-kidnappings-bombings-and-other-attacks/story/>

- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *WACANA*, 13, 181.
- Parameswaran, P. (2016, September 13). Retrieved March 04, 2019, from www.thediplomat.com: <https://thediplomat.com/2016/09/indonesia-and-the-philippines-enter-the-duterte-era/>
- Parlina, I. (2016, September 10). Retrieved Oktober 18, 2019, from thejakartapost.com: <https://www.thejakartapost.com/news/2016/09/10/jokowi-duterte-firm-friends.html>
- Presiden, K. S. (2017, April 28). Retrieved Juli 31, 2019, from ksp.go.id: <http://ksp.go.id/kerja-sama-pelayaran-indonesia-filipina-perkuat-konektivitas-asean/>
- Raharjo, S. N. (2017). *PENINGKATAN EFEKTIVITAS PERDAGANGAN LINTAS BATAS INDONESIA-FILIPINA : Upaya Mendukung Ketahanan Sosial Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Terluar*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*, 5, 2.
- ReCAAP. (2016). *Annual Report Piracy and Armed Robbery Against Ships In Asia 2016*. ReCAAP.
- ReCAAP. (2018). *Annual Report Piracy and Armed Robbery Against Ship In Asia 2018*. ReCAAP. Retrieved September 24, 2019
- Reporters, F. (2016, Juni 24). Retrieved September 10, 2019, from freemalaysiatoday.com: <https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2016/06/24/malysians-are-funding-abu-sayyaf-claims-report/>
- Reynolds, C. G. (1974). *Command of The Sea : The History and Strategy of Maritime Empires*. California: Morrow.
- Robert Jackson & Georg Sorensen. (2014). *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Roza, R. (2018). KEAMANAN LAUT SULU-SULAWESI: KAJI ULANG KERJA SAMA TRILATERAL? *Pusat Penelitian DPR RI*, 10, 8.

- Rustam, I. (2017, Desember). Kebijakan Maritim di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi - Laut Sulu. *Jurnal Penelitian Politik*, 14, 167-173.
- Samosir, H. A. (2016, Januari 13). Dipetik Maret 12, 2019, dari www.cnnindonesia.com:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160112104302-106-103678/mengurai-akar-konflik-filipina-dari-separatis-hingga-isis>
- Tan-Cullamar, E. (1993). The Indonesian Diaspora and Philippine-Indonesian Relations. *Philippine Studies*, 42-43. Retrieved Oktober 17, 2019
- Tempo. (2016, Maret 29). Retrieved Maret 05, 2019, from www.nasional.tempo.co:
<https://nasional.tempo.co/read/757786/wni-disandera-abu-sayyaf-kapal-perang-tni-siaga-di-ambalat>
- Till, G. (2014). *Seapower : A Guide for the Twenty-First Century*. Portland: Frank Cass Publisher.
- Underdal, A. (2002). One Question, Two Answers. Dalam *Environmental Regime Effectiveness : Confronting Theory with Evidence* (hal. 4). Massachusetts: The MIT Press.
- Underdal, A. (2001). *Explaining Regime Effectiveness*. University of Oslo.
- Wargadiredja, A. T. (2017, Maret 6). Retrieved September 9, 2019, from vice.com:
https://www.vice.com/id_id/article/bmdv58/selat-malaka-dan-laut-sulu-jadi-zona-perompakan-paling-berbahaya-bagi-indonesia
- Wee, J. Y. (2017). MARITIME TERRORISM THREAT IN SOUTHEAST ASIA AND ITS CHALLENGES. *Journal of The Singapore Armed Forces*, 43, 33. Retrieved September 11, 2019
- Young, A. J. (2007). *Contemporary Maritime Piracy in Southeast Asia : History, Causes, and Remedies*. Pasir Panjang: Institute of Southeast Asian Studies.
- Young, O. (1994). *International Governance: Protecting the Environment in a Stateless Society*. New York: Cornell University Press.



جامعة الإسلام في إندونيسيا



جامعة الإسلام في إندونيسيا